

**UPAYA SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP QASEM
SOLEIMANI DALAM KONTEKS ESKALASI KONFLIK AS DAN IRAN**

TAHUN 2019 - 2020

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ALDHO FARUQI TUTUKANSA

19323199

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**UPAYA SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP QASEM
SOLEIMANI DALAM KONTEKS ESKALASI KONFLIK AS DAN IRAN**

TAHUN 2019-2020

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ALDHO FARUQI TUTUKANSA

19323199

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya Sekuritisasi Amerika Serikat Terhadap Qasem Soleimani Dalam Konteks Eskalasi Konflik AS Dan Iran Tahun 2019 – 2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

15 Juni 2023

Mengesahkan,

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

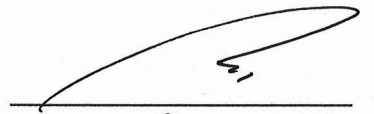


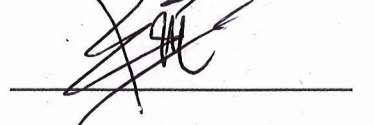
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A. Ph.D
- 2 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 20 Mei 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 2000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI PEMPEL' and '990F1AKX414645244'. The signature is written in a cursive style.

Aldho Faruqi Tutukansa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR SINGKATAN.....	7
Abstrak.....	8
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara/Hipotesis.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian.....</i>	<i>14</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....</i>	<i>15</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>15</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian.....</i>	<i>16</i>
1.9 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	
PERAN QASEM SOLEIMANI DALAM ESKALASI KONFLIK AS-IRAN 2019-2020.....	17
2.1. Deskripsi Peran dan Pengaruh Qasem Soleimani Bagi Amerika Serikat.....	18
<i>2.1.1. Pembentukan PMF dan Operasi Militer Iran Terhadap Penyerangan ISIL.....</i>	<i>19</i>
<i>2.1.2. Pemberian Penghargaan Kehormatan Terhadap Soleimani.....</i>	<i>20</i>
<i>2.1.3. Upaya Intervensi Iran Terhadap Irak.....</i>	<i>21</i>
2.2. Peristiwa Sekuritisasi Awal Amerika Serikat Terhadap Soleimani.....	22
<i>2.2.1. Sekuritisasi Awal Amerika Serikat atas Proxy Sabotage dari Soleimani.....</i>	<i>25</i>
<i>2.2.2. Insiden Saling Menyerang Amerika Serikat - Iran selama Desember 2019.....</i>	<i>27</i>
BAB III	
IMPLEMENTASI KONSEP SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP SOLEIMANI.....	31

3.1. Referent Object pada Sekuritisasi Terhadap Iran dan Soleimani.....	32
3.2. Amerika Serikat sebagai Aktor Sekuritisasi Terhadap Soleimani....	37
3.2.1. <i>Amerika Serikat memberi Labelling Qasem Soleimani dan IRGC sebagai bagian dalam Foreign Terrorist Organization (FTO).....</i>	38
3.2.2. <i>Berbagai Pernyataan Para Elit Berkepentingan Amerika Serikat yang Ikut Serta.....</i>	40
3.3. Qasem Soleimani sebagai Functional Actor.....	41
3.4. Breaking Free of Rules dan Sekuritisasi Amerika Serikat.....	44
3.4.1. <i>Pembunuhan Soleimani dan Sekuritisasi Amerika Serikat.....</i>	45
3.4.2. <i>Faktor Penggunaan Speech Act dan Pelanggaran Hukum Amerika Serikat Tentang Pembunuhan Soleimani.....</i>	47
BAB IV	
PENUTUP.....	53
4.1. Kesimpulan.....	53
4.2. Saran dan Rekomendasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR SINGKATAN

AIPAC	: American-Israel Public Affairs Committee
AS	: Amerika Serikat
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
FSA	: Free Syrian Army
FTO	: Foreign Terrorist Organizations
HAM	: Hak Asasi Manusia
IRGC	: Iran Revolutionary Guard Corps
ISIL	: Islamic State in Iraq and the Leviant
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
JCPOA	: Joint Comprehensive Plan of Action
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMF	: Popular Mobilization Force
POTUS	: The President of The United States
US	: United States
USD	: United States Dollar
USC	: United States Code

Abstrak

Mayor Jenderal Qasem Soleimani merupakan salah satu aktor non-negara yang memiliki peranan penting bagi Pertahanan dan Keamanan Iran. Soleimani juga merupakan salah satu Komandan dari *Iran Revolutionary Guard Corps* (IRGC) yang merupakan kelompok militer elit dari Iran. Dengan berbagai peran dan pengaruh yang dimiliki Soleimani tentu berdampak bagi Kawasan Timur Tengah melalui operasi dan kerjasama militer dengan berbagai negara di Jazirah Arab. Di tengah masa konflik yang mengalami eskalasi antara Amerika Serikat dan Iran pada tahun 2019, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah tindakan berbentuk sekuritisasi terhadap Soleimani di Timur Tengah dalam rangka mengakhiri eskalasi konflik tersebut terhadap Iran sebagai objek yang dituju akibat pengaruh Iran yang kerap dibayangi oleh Amerika Serikat atas ulah dan tindakan yang dilakukan oleh Soleimani sebagai Komandan IRGC. Maka dari itu, pada penelitian ini akan menganalisis berbagai upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pembunuhan Soleimani yang kerap sebagai dalih Amerika untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Kata Kunci: Qasem Soleimani, Amerika Serikat, Iran, IRGC, Sekuritisasi, dan Eskalasi Konflik

Abstract

Major General Qasem Soleimani is a non-state actor who has an important role for Iran's Defense and Security. Soleimani was also one of the Commanders of the Iran Revolutionary Guard Corps (IRGC), which is an elite military group from Iran. With the various roles and influences that Soleimani had, it certainly had an impact on the Middle East Region through operations and military cooperation with other countries in the Arabian Peninsula. In the midst of an escalating conflict between the United States and Iran in 2019, United States President Donald Trump took action in the form of securitization against Soleimani in the Middle East in order to end the escalation of the conflict against Iran as the intended object due to Iran's influence which is often overshadowed by United States of America for the acts and actions taken by Soleimani as Commander of the IRGC. Therefore, this research will analyze the various securitization efforts made by the United States against Soleimani's assassination which is often used as America's excuse to end the conflict between the United States and Iran.

Keywords: *Qasem Soleimani, United States, Iran, IRGC, Securitization, and Conflict Escalation*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Timur-Tengah menjadi salah satu regional yang memiliki berbagai fenomena dan isu yang kerap terjadi dan bersifat berkepanjangan, termasuk Negara Republik Islam Iran terlibat sebagai aktor dalam permasalahan tersebut. Iran telah terlibat dalam konflik hingga perang sejak masa jatuhnya Kerajaan Iran di bawah rezim Dinasti Pahlevi pada tahun 1979. Jatuhnya rezim tersebut disebabkan dari ketidakpuasan masyarakat beserta ulama dalam kebijakan sosial dan ekonomi secara berlanjut melalui program yang dibawakan oleh Mohammad Reza Pahlavi. Ketidakpuasan tersebut tentu memberikan dorongan untuk melakukan pergerakan Revolusi Iran 1979 yang dibawakan oleh Ruhallah Ayatollah Khomeini, seorang Imam dari Islam Syiah di Iran. Adapun tujuan dari Revolusi Iran tersebut yaitu membawa kembali sistem negara dan pemerintahan Iran berdasarkan pada ajaran tradisi Islam. Setelah adanya pergerakan Revolusi Iran tersebut kemudian mengubah sistem pemerintahan Iran dari dinasti kerajaan menjadi Republik Islam Iran atau dikenal dengan *Jomhuriye Islamiye Iran*. Revolusi pada Iran ini seharusnya dapat memberikan perubahan transisi yang lebih baik. Akan tetapi, hal yang terjadi kemudian sebaliknya, eskalasi konflik yang terjadi pada Iran malah makin meningkat dan berdampak besar bagi Kawasan Timur-Tengah. Eskalasi seperti ini tentu menimbulkan berbagai perlawanan bagi Iran, seperti Konflik antara Iran dengan Israel, Irak, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat.

Konflik tersebut mendorong dari adanya berbagai peperangan, baik dalam bentuk perang secara langsung, maupun melalui *proxy war* yang terjadi hingga saat ini. Jika diperjelas secara kompleks bahwa keterlibatan Iran dalam eskalasi konflik di Timur-Tengah tentu memiliki sifat yang kontemporer. Seperti salah satu kasus *proxy war* yang difokuskan terhadap perilaku dari hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat. Dilansir dari *BBC Indonesia* (2020), Hubungan kedua negara ini mulai memanas ketika pada tahun 1950 terjadinya perebutan pengelolaan pada minyak bumi yang dipicu antara Iran dan Amerika Serikat. Perebutan pengelolaan minyak bumi ini disebabkan dari adanya rencana untuk diambil alih dari kepemilikan perusahaan Inggris melalui kebijakan Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadeq dengan tujuan agar pemerintahan Iran dapat mengelola kekayaan alamnya sendiri. Perebutan kilang minyak ini tentu menimbulkan pergolakan konflik di mana AS mulai melakukan intervensi terhadap Pemerintahan Iran dalam rangka mengkuudeta Perdana Menteri Iran dan mengangkat Mohammad Reza Shah sebagai pemimpin Iran. Kemudian, konflik ini juga dirasakan oleh beberapa negara di Arab dengan adanya saling intervensi antar negara dalam bentuk perlawanan *proxy war*. Konflik antara Iran dengan negara-negara Arab ini tentu berpengaruh dari adanya Fenomena *Arab Spring* sebagai gejolak politik yang dimotori oleh negara di Magrib hingga menyebar di Dunia Arab. Bahkan, Iran juga menjadi bagian dari fenomena ini sebagaimana bukan hanya pada pengaruh geopolitik saja, tetapi adanya politik komparatif dari Iran dengan negara-negara di Arab, termasuk Amerika Serikat. Konflik Permasalahan seperti ini tentu menjadi tantangan terbesar bagi Iran dalam memperkuat keamanan negara mereka. Sejak masa awal Revolusi, Iran telah

membentuk kelompok pasukan militer sebagai bagian dari implementasi pada peningkatan pertahanan dan keamanan Iran dalam menghadapi berbagai konflik. Kelompok Pasukan Militer Iran yang kemudian membuka peran para pasukan dan tokoh militer dari Iran untuk melaksanakan berbagai operasi mereka, termasuk adanya kelompok ini membuka ruang bagi Qassem Soleimani dalam keterlibatannya.

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat kemudian kembali bersitegang ketika pada tahun 2018, Amerika Serikat melalui kebijakan yang disahkan oleh Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik diri pada Kesepakatan Nuklir Iran atau dapat dikenal dengan istilah *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada tanggal 8 Mei 2018. Padahal, JCPOA sendiri merupakan sebuah hasil upaya yang dilakukan secara diplomatis oleh beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Iran sebagai penandatanganan kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan sebagai penyelesaian alternatif dari berbagai sanksi yang telah dikeluarkan oleh negara-negara Barat kepada Iran atas tuduhan pengembangan nuklir yang diklaim disalahgunakan. Atas kebijakan penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA, Amerika Serikat pun kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran terhadap penggunaan nuklir yang dijadikan sebagai kekuatannya (Paramasatya & Wiranto, 2019). Pemberian sanksi tersebut kemudian berimplikasi dengan hubungan Amerika Serikat dan Iran yang semakin memanas.

Memanasnya konflik antara kedua negara tersebut ditandai dengan adanya Krisis Teluk yang terjadi pada tahun 2019. Krisis ini disebabkan pada keluarnya AS dari JCPOA sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diikuti dengan sanksi yang diberikan oleh AS terhadap Iran, hingga adanya saling

tuduh-menuduh antara AS dan Iran terhadap organisasi militer mereka yang dianggap sebagai kelompok berbahaya. Dari berbagai penyebab tersebut mengakibatkan memanasnya kembali konflik antara AS dan Iran sejak 5 Mei 2019 dan ditandai dengan adanya pengiriman pasukan dan persenjataan AS ke wilayah perbatasan Irak dan Iran. AS sendiri telah membentuk sebuah aliansi dalam menghadapi Iran dengan mengajak Israel, Arab Saudi, Inggris, hingga Australia. Bahkan, konflik hubungan kedua negara ini pun secara tidak langsung kemudian menjadi meningkat dengan adanya tuduhan Amerika Serikat terhadap Iran yang ditujukan kepada Mayor Jenderal Qasem Soleimani yang pada saat itu beliau merupakan Komandan Pasukan Elit Al-Quds, cabang dari *Iran Islamic Revolutionary Guard Corps*. Dikutip dari laman berita *online* Kompas (2021), cabang kelompok militer Iran yang dipimpin oleh beliau ini memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan operasi militer yang dikhususkan pada urusan konflik dan peperangan di luar negara Iran dan masih berada dalam ranah Kawasan Timur-Tengah. Alasan penuduhan yang dilakukan oleh Negeri Paman Sam kepada salah satu tokoh petinggi militer yang disegani oleh masyarakat Iran, bahkan se-Timur Tengah ini yaitu adanya langkah rencana besar yang dilakukan oleh beliau untuk melakukan serangan dalam skala yang sangat besar terhadap empat kedutaan besar Amerika Serikat dalam waktu dekat (Christiyaningsih, 2020).

Dari tuduhan yang dilontarkan dari Amerika Serikat tersebut, hingga pada akhirnya, bertepatan pada tanggal 3 Januari 2020, Amerika Serikat secara sah melalui kebijakan dari pemerintahannya untuk melancarkan aksi perlawanan kepada Iran. Aksi perlawanan tersebut ditujukan dengan melakukan pembunuhan

terhadap Qasem Soleimani. Lalu, aksi tersebut kemudian berhasil dan Qasem Soleimani tewas. Hal ini terjadi ketika Qasem Soleimani melakukan kunjungan dan sedang berada dalam perjalanan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Iraq, Adil Abdul Mahdi di Baghdad. Akan tetapi, ketika rombongan beliau masih di sekitar Bandar Udara Internasional Baghdad, terdapat serangan drone yang ditembak dari Pesawat Tanpa Awak milik Militer Amerika Serikat atas perintah dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Drone yang dijatuhkan tersebut tepat sasaran pada rombongan dari Kelompok Militer IRGC Al-Quds dan Qassem Soleimani tewas dari serangan tersebut (Taufiq & Alkholid, 2021). Dan pada awal tahun 2020, Republik Islam Iran menyatakan telah kehilangan salah satu tokoh berpengaruh mereka yaitu Mayor Jenderal Qasem Soleimani. Pembunuhan terhadap beliau ini tentu menimbulkan eskalasi konflik yang semakin besar dalam ranah internasional, khususnya hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat. Namun, nama beliau mulai dikenal dari sebuah peristiwa kematiannya di Irak akibat adanya pembunuhan berencana. Padahal, mengingat kembali bahwa sang Komandan ini merupakan salah satu tokoh penting bagi Iran dan bukan sebagai aktor negara dalam ranah pemerintahan. Bahkan, kharismatik beliau pun menjadikan sebagai tokoh kedua yang memberikan pengaruh bagi Iran. Kharismatik dari beliau ini berasal dari peran beliau ketika dalam menangani berbagai konflik yang berada di Kawasan Timur-Tengah. Kemudian, beliau juga sebagai salah satu aktor yang terlibat penting dalam peristiwa *proxy war* di Timur-Tengah. Sehingga, ada beberapa indikasi yang berasal dari Qassem Soleimani dalam memberikan pengaruh pada peristiwa di Timur-Tengah.

Melihat kembali dari latar belakang tersebut tentu akan menjadi pembahasan yang sangat spesifik mengarah pada Qasem Soleimani yang dikaitkan dalam eskalasi konflik Iran dan Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri telah melakukan perlawanan terhadap Iran sejak dahulu hingga saat ini. Namun, di masa pertengahan, Amerika Serikat sempat membuka upaya lain dalam hubungannya dengan Iran, yaitu mengajak negeri Syiah tersebut untuk melakukan penandatanganan pada JCPOA di tahun 2015. Perjanjian kesepakatan tersebut pada kenyataannya hanya berjalan dengan singkat ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dan kembali memberikan sanksi perlawanan terhadap Iran. Sanksi tersebut semakin menguat ketika Amerika Serikat menuduh Qasem Soleimani atas tindakannya yang dianggap membahayakan bagi Amerika Serikat. Sehingga, di balik dari permasalahan ini akan ada isu spesifik yang ditujukan pada Qasem Soleimani melalui peran dan langkah beliau berdasarkan pada perspektif Teori Sekuritisasi yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan menjadikan Iran sebagai salah satu sasaran utama mereka untuk melakukan perlawanan melalui proses internal yang dilakukan oleh Amerika Serikat, baik dari segi politik, ekonomi, hingga keamanan yang mereka lancarkan. Oleh karena itu, pada topik penelitian ini akan melakukan kajian mengenai apa saja sudut pandang dari Amerika Serikat untuk melakukan sekuritisasi dengan memilih Qasem Soleimani sebagai sasaran utama untuk dilakukan pembunuhan dan hubungan apakah antara sosok jenderal bintang dua ini dengan Iran pada tahun 2019 – 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya sekuritisasi Amerika Serikat terhadap Qasem Soleimani pada konteks Eskalasi Konflik AS-Iran tahun 2019 -2020?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengkaji faktor Soleimani dalam eskalasi konflik antara AS dan Iran
- Untuk menjelaskan upaya sekuritisasi AS terhadap Qasem Soleimani yang berdampak pada Eskalasi Konflik AS-Iran tahun 2019-2020
- Untuk meneliti Sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pembunuhan Qasem Soleimani

1.4 Cakupan penelitian

Adapun cakupan penelitian pada skripsi ini yang mengarah pada salah satu aktor non-negara dari Iran, Qasem Soleimani sebagai objek yang memberikan pengaruh pada berbagai langkah kebijakan Amerika Serikat dalam menghadapi eskalasi konflik dengan Iran sebagai subjek yang terlibat. Kemudian, konteks pada penelitian ini akan membahas secara spesifik pada proses pengambilan keputusan dari Amerika Serikat yang memilih Qasem Soleimani sebagai sasaran yang menjadi bagian dianggap berpengaruh bagi Iran ditinjau dalam pendekatan pada Konsep Teori Sekuritisasi pada Amerika Serikat. Konsep teori ini dapat dijadikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian pada topik proposal skripsi ini. Kemudian, fenomena yang dituju ketika adanya konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat dengan cakupan tahun 2019 – 2020 dengan

menspesifikkan dinamika hubungan kedua negara tersebut selama tahun 2019 dan terlibatnya Qasem Soleimani pada konflik antar kedua negara tersebut. Sebab, eskalasi konflik tersebut mulai terjadi kembali ketika Amerika Serikat menyatakan keluar dalam perjanjian JCPOA dan kembali memberikan sanksi kepada Iran atas tuduhan penggunaan nuklir untuk dijadikan sebagai senjata hingga persaingan kekuatan yang masih kerap terjadi. Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk studi literatur.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini membutuhkan beberapa sumber atau data pendukung yang menjadi acuan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Sumber tersebut dalam bentuk literatur tentu memiliki hubungan yang saling terkait dalam meneliti studi kasus yang akan disajikan. Adapun beberapa kajian teori yang akan menjadi bahan dalam melakukan penelitian skripsi ini, di antaranya:

Pertama, terdapat sebuah jurnal yang berjudul “*Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*” yang ditulis pada tahun 2019. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai awal mula eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang mulai kembali memanas pada tahun 2018 disebabkan dengan kebijakan AS atas penarikan dirinya dari kesepakatan JCPOA. Kebijakan tersebut menimbulkan berbagai dilema dalam urusan keamanan di Timur-Tengah, khususnya Iran. Adapun alasan AS menarik diri dari JCPOA yaitu kekhawatirannya dengan Iran ketika mereka berhasil memanfaatkan keringanan sanksi ekonominya dengan adanya celah untuk mengembangkan kembali energi nuklir. Serta, AS juga menganggap JCPOA hanya menguntungkan

kepada Iran dengan tuduhan berupaya menjadikan nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Tindakan sepihak oleh Presiden Donald Trump menyebabkan pro dan kontra dari berbagai negara lain. Seperti, negara-negara dalam Perjanjian JCPOA menganggap keluarnya AS akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi Iran dalam pengembangan energi nuklir dan pemulihan ekonomi perdagangan mereka.

Kemudian, sebuah jurnal tentang *“Iran-US Relations After the Death of Qassem Soleimani”* yang ditulis pada tahun 2021. Jurnal ini menjadi sumber secara kronologis pada eskalasi konflik Iran dan AS yang dispesifikkan pada masa keluarnya AS dari JCPOA pada tahun 2018 hingga melakukan tindakan pembunuhan terhadap Qasem Soleimani pada awal tahun 2020. Firmada dan Ayu membahas mengenai upaya manuver yang dilakukan oleh AS dalam melakukan konflik perlawanan dengan Iran dalam menegakkan sanksi ekonominya. Adanya saling tuduh-menuduh juga menimbulkan perlawanan dengan melakukan serangan pada logistik negara lain seperti kapal tanker dan kilang pengeboran minyak milik Arab Saudi yang kemudian AS secara langsung menuduh Iran yang melakukan tindakan tersebut (Shear et al. 2019). Intinya, jurnal ini diibaratkan sebagai jembatan pada kasus antara JCPOA dan konflik antara Iran dan AS.

Ketiga, sebuah tinjauan pustaka dalam bentuk jurnal *“Penyebab Tewasnya Qassem Soleimani oleh Amerika Serikat dan Dampaknya Terhadap Keamanan Internasional”* (Agustina & Finaldin, 2020) memaparkan peran dan tindakan yang dilakukan oleh Qasem Soleimani sehingga dianggap sebagai sosok yang berpengaruh bagi Iran atas keberaniannya dalam menghadapi perlawanan

terhadap serangan AS. Keberanian dari beliau tentu memberikan dampak yang berbahaya bagi AS dalam melaksanakan kepentingan intervensinya di Kawasan Timur-Tengah dan juga berpengaruh dengan negara-negara Timur-Tengah yang bersekutu dengan AS, seperti Arab Saudi, Israel, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara lainnya. Serta, konteks yang diarahkan lebih mengarah ke dampak yang terjadi pasca-pembunuhan Qasem Soleimani terhadap hubungan antara Iran dan Amerika Serikat.

Berbagai pemaparan pada beberapa penelitian sebelumnya memiliki keragaman dalam pembahasan dan penyusunannya pada suatu tema. Seperti pada fenomena konflik yang terjadi antara Iran dan AS, *interstate security* di Iran, pembunuhan terhadap Qasem Soleimani, hingga berimplikasi pada *proxy war* di Kawasan Timur Tengah. Akan tetapi, studi kasus skripsi ini tentu memiliki kajian dan pembahasan yang berbeda dibandingkan dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pada penulis bahwa aspek yang diperhatikan yaitu menghubungkan antara Qasem Soleimani sebagai aktor yang berpengaruh pada konflik Iran-AS yang kemudian dipaparkan dengan konsep Teori Sekuritisasi. Hal ini berkaca pada kronologi peristiwa yang terjadi pada Iran sejak tahun 2019 hingga 2020 dengan menghadapi berbagai tuduhan, perlawanan, hingga serangan dari AS. Lalu, Qasem Soleimani juga dianggap sebagai aktor non-negara yang kemudian mampu memberikan pengaruh besar bagi negaranya dalam menghadapi berbagai konflik geopolitik yang terjadi di Kawasan Timur-Tengah. Sehingga, berbagai sumber yang telah disajikan sebelumnya tentu menjadi kerangka referensi dalam melakukan penelitian dan analisis antara aktor

non-negara dengan negara ditinjau dengan perspektif yang sangat berbeda dalam bentuk teori.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pandangan penulis mengenai penelitian ini yaitu melakukan pengkajian pada suatu isu yang akan dibahas dengan melakukan analisis dengan salah satu teori yang tentunya akan memiliki hubungan yang saling terkait. Teori yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yang akan dianalisis ini memiliki cakupan yang bersifat menyeluruh, di mana bukan hanya mengarah pada salah satu negara saja, tetapi juga mampu memberikan pandangan pengaruh bagi seluruh negara di dunia.

Pada penulisan ini terdapat sebuah kerangka yang mampu menjadi sumber pendukung dalam membahas kasus yang akan dianalisis, yaitu *Securitization Theory* atau Teori Sekuritisasi. Alasan memilih teori ini karena adanya hal yang saling berkesinambungan antara Barat dengan Kawasan di Timur-Tengah. Serta, teori ini juga dapat dikatakan sebagai pokok pemikiran yang berpengaruh untuk mencari tahu pada kasus yang akan dianalisis dengan mengacu pada berbagai penjelasan berdasarkan dari Konsep Keamanan Internasional. Secara dasar, konsep teori ini menjadi bagian dalam teori keamanan, di mana memiliki model dalam bentuk kepentingan keamanan nasional yang mencakup secara geografis yang menimbulkan saling interdependensi antar negara dan kawasan.

Adapun pernyataan dari Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998), konsep pada Teori Sekuritisasi diidentifikasi pada problematika keamanan yang berhubungan dengan urusan politik dalam isu publik. Pada teori

ini juga terdapat peran yang dilakukan oleh aktor, dimana aktor tersebut berupa negara yang mendominasi, di mana memiliki hal-hal yang saling erat satu sama lain. Teori Sekuritisasi di sanggah pernyataan yang disampaikan oleh Buzan dan Weaver dengan kerangka analisis terhadap perkembangan isu keamanan, di mana isu tersebut dalam bentuk ancaman yang di-*framing* oleh suatu negara yang terlibat dalam melaksanakan kepentingannya melalui *speech act*. Hal ini dapat diketahui bagaimana sekuritisasi yang dilakukan oleh AS terhadap Iran yang mengarah pada bentuk sekuritisasi aktor (Lenz-Raymann 2014). Sebab, memanasnya hubungan kedua negara tersebut dimanfaatkan oleh Presiden AS Donald Trump untuk melaksanakan sekuritisasinya dalam bentuk *speech act* yang berulang sebagai upaya untuk menjatuhkan Iran yang dianggap sebagai ancaman keamanan. Melalui pendekatan tersebut menjadikan AS sebagai aktor fungsional dalam urusan keamanan dengan mengarah pada objek rujukan pada Iran dan sasaran utama yang dilancarkan AS yaitu Soleimani, sejak AS menyatakan keluar dari JCPOA. Maka dari itu, Teori ini juga menjadi bagian dalam Mazhab Kopenhagen yang menjadi jawaban penyanggah dalam melakukan analisis langkah sekuritisasi AS dalam melakukan pembunuhan terhadap Qasem Soleimani.

Setelah itu, terdapat variabel yang kemudian menjadi tingkat analisis pendekatan sekuritisasi dalam bentuk *speech act* beserta penjelasan awal menurut Buzan dan Weaver, di antaranya:

1. Objek Referensi atau *Referent Objects*

Objek referensi dapat diartikan sebagai salah satu pihak atau negara yang dianggap terancam secara eksistensial ketika permasalahan yang terjadi melalui legitimasi yang belum segera diproses.

2. Aktor Sekuritisasi atau *Securitizing Actors*

Aktor sekuritisasi merupakan suatu pihak, seperti negara yang memiliki peran dalam melaksanakan tindakan keamanan atau sekuritisasi terhadap objek referensi melalui legitimasi yang seolah-olah dianggap melanggar tindakan hukum. Hal yang dilakukan aktor sekuritisasi berupa *speech act* dengan perumusan kebijakan pemerintah yang bersifat darurat untuk menyatakan salah satu pihak yang dianggap melanggar ketentuan dari pihak yang melakukan sekuritisasi.

3. Aktor Fungsional atau *Functional Actors*

Aktor fungsional dimaknai sebagai aktor sentral yang memberikan pengaruh pada dinamika suatu sektor, baik bersifat politik maupun non-politik. Aktor tersebut diindikasikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada isu keamanan yang membuat suatu pihak yang melaksanakan sekuritisasi merasa terancam dari objek referensi. Tidak lupa juga, aktor tersebut dianggap secara signifikan memberikan pengaruh antara dua pendekatan sebelumnya dalam bidang keamanan.

4. *Breaking Free of Rules*

Breaking Free of Rules atau pelanggaran aturan dapat terjadi jika adanya hubungan antar pihak yang kemudian menimbulkan berbagai efek. Fenomena ini dibuktikan dengan suatu isu yang dianggap sebagai ancaman yang bersifat eksistensial. Isu akan menjadi suatu hal yang begitu relevan

jika salah satu pihak mampu mengatasi permasalahan tersebut. (Buzan, Wæver, and Wilde 1998)

1.7 Argumen Sementara/Hipotesis

Amerika Serikat melaksanakan sekuritisasinya diawali bertuju kepada Iran dengan menjatuhkan sanksi keamanan berupa penambahan pasukannya ketika konflik mengalami eskalasi pada bulan Mei 2019. Kemudian, diikuti dengan adanya peran yang dilakukan oleh Qasem Soleimani dari tahun ke tahun melakukan operasi militer ke berbagai negara di Timur-Tengah hingga membentuk koalisi bersenjata dengan milisi Syiah di Irak. Selama Irak dikuasai oleh pasukan militer AS membuat kecaman yang dilontarkan atas tindakan operasi militer yang dilaksanakan oleh Soleimani yang dianggap mengganggu misi keamanan AS. Kecaman tersebut dimulai dengan pelaksanaan sekuritisasi terhadap Iran dan Soleimani dengan melakukan aksi balas dendam dan penyerangan antara AS dan Iran. Bahkan, ditindaklanjuti oleh AS dengan membentuk sebuah kebijakan yang menyatakan Soleimani sebagai Komandan IRGC sebagai terorisme yang termasuk dalam agenda sekuritisasi AS. Lalu, Soleimani menjadi sasaran utama bagi AS untuk dibunuh atas peristiwa yang menimpa dari beberapa masyarakat sipilnya yang tewas di Irak akibat serangan yang diduga bersumber dari IRGC. Pembunuhan yang dilakukan tersebut dilandasi sebagai bagian upaya sekuritisasi AS dalam bentuk *self-defense* yang dikategorikan dalam bentuk pelanggaran hukum internasional dalam segi teritorial negara lain.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Moleong (2010) merupakan sebuah metode penelitian dalam menjelaskan berbagai subjek penelitian berupa motivasi, pandangan, perilaku, dan tindakan yang dilakukan secara holistik dan dijelaskan dalam bentuk kata dan bahasa secara deskriptif terhadap konteks yang dituju secara alamiah, diikuti dengan metode ilmiah yang dapat digunakan. Intinya, metode kualitatif yaitu metode yang memaparkan berbagai fenomena yang terjadi dan diikuti dengan sistematika secara ilmiah. Maka dari itu, metode ini bertujuan untuk memaparkan fenomena dari peristiwa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam melakukan upaya tindakan penyerangan terhadap Qasem Soleimani.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini terdapat subjek dan objek yang dijadikan sebagai bagian dalam analisis yang akan dilakukan. Subjek pada penelitian ini ditujukan oleh aktor negara yaitu Amerika Serikat, sedangkan objek penelitian yang dituju yaitu Iran dan Qasem Soleimani, salah satu aktor non-negara. Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang saling berkesinambungan dalam kaitannya dengan keamanan dan intervensi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan metode studi literatur. Studi literatur yang akan dilakukan dengan membaca berbagai jenis literatur, seperti buku, jurnal, dokumen, website kredibel nasional dan internasional, artikel, hingga dokumen yang memiliki korelasi dengan studi kasus

yang akan dianalisis dengan mengutamakan literatur mengenai Amerika Serikat, Timur-Tengah, Iran, peran IRGC, dinamika antar kedua negara, hingga *Securitization Theory*. Berbagai jenis literatur tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk data primer dan sekunder.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan berupa penjelasan secara tertulis, di mana terdapat beberapa pembahasan yang kemudian dikutip dari berbagai penjelasan yang bersumber pada literatur secara spesifik hingga beberapa *statement* yang disampaikan oleh berbagai pihak yang terlibat pada sebelumnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang akan dilakukan secara sistematis memaparkan berbagai alur yang telah disajikan dalam penulisan ini. Jika dilihat kembali bahwa pada Bab I penelitian ini memaparkan alasan penulis memilih kasus ini beserta menemukan *research gap* dari penyebab Amerika Serikat membunuh Qasem Soleimani di bawah keputusan Presiden Donald Trump. Kemudian, Bab II akan membahas Dinamika Konflik Iran dan AS serta peran Soleimani dalam meningkatkan eskalasi tersebut selama tahun 2019-2020. Lalu, Bab III akan menganalisis studi kasus dalam perspektif *Securitization Theory* dari kebijakan dan implementasi Amerika Serikat ketika berhadapan dengan Iran dan Soleimani, dengan konteks mengarah pada aktor non-negara sebagai objek yang dituju. Serta, Bab IV akan menjelaskan mengenai kesimpulan secara menyeluruh dengan singkat, padat, dan jelas dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB II
PERAN QASEM SOLEIMANI DALAM ESKALASI KONFLIK AS-IRAN
2019-2020

Amerika Serikat dengan Iran hingga saat ini masih memiliki hubungan yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan sejak masa Revolusi pada tahun 1979 membuat Iran melakukan perubahan pada haluan dan tujuan negara mereka. Perubahan haluan tersebut kemudian melahirkan berbagai kontroversi dari sebagian besar negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat yang menyayangkan terhadap langkah tersebut. Bahkan, Amerika Serikat tidak diam begitu saja dan mulai melakukan operasi militer secara langsung menuju Iran dalam mengantisipasi serangan yang akan dilakukan oleh salah satu negara Timur-Tengah tersebut. Berbagai isu konflik yang terjadi membuat Iran memerlukan peningkatan dan penguatan persenjataan dalam memperkuat stabilitas keamanan mereka. Upaya peningkatan stabilitas keamanan Iran dengan melakukan perekrutan secara besar-besaran bagi masyarakat Iran untuk bergabung ke Pasukan Militer mereka dan salah satu yang tergabung pada pasukan tersebut yaitu Qasem Soleimani. Meskipun terlahir sebagai masyarakat yang rural, namun kecerdasan dan kecerdikan beliau membuat beberapa negara mulai merasa khawatir atas keberadaan beliau dari taktik dan strategi jitu yang dilakukan. Hal ini yang membuat Amerika Serikat mulai berupaya untuk meredam aksi yang dilakukan oleh Qasem Soleimani. Sebagaimana pada penelitian ini bahwa ada beberapa poin yang dapat dipaparkan secara sistematis hingga terjadinya aksi sekuritisasi yang dimulai oleh AS terlebih dahulu.

2.1. Deskripsi Peran dan Pengaruh Qasem Soleimani bagi Amerika Serikat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa puncak eskalasi konflik antara AS dan Iran dipengaruhi dengan adanya peristiwa terhadap Mayor Jenderal Qasem Soleimani, Komandan IRGC *Al-Quds* Iran. Soleimani dianggap berpengaruh karena berbagai tindakan dan pencapaiannya membuat AS mengindikasikan Soleimani sebagai aktor yang dapat memberikan ancaman bagi stabilitas militer AS di Timur Tengah. Hal ini disebabkan dari tindakannya cenderung meningkatkan bersitegangnya kembali hubungan antara AS dengan Iran selama tahun 2019. Soleimani sebelumnya mulai bergabung dalam pasukan militer Iran sejak masa Revolusi Islam Iran 1979 dan telah memiliki keterlibatan penting pada berbagai upaya operasi militer di beberapa negara. Peran yang dilakukan oleh Soleimani bukan hanya dalam segi keamanan antarnegara saja, tetapi juga membawa pasukannya ke beberapa negara di sekitarnya, seperti di Irak, Suriah, hingga Yaman. Bahkan, Soleimani pada saat itu diberikan amanah untuk menjadi Komandan IRGC *Al-Quds* Iran dalam rangka mencegah upaya invasi dari AS terhadap Iran dan Kawasan Timur Tengah.

2.1.1. Pembentukan PMF dan Operasi Militer Iran Terhadap Penyerangan ISIL

Segala peran yang dilakukan membuat Soleimani menjadi sosok yang sangat berjasa bagi Iran. Salah satunya yaitu ketika Soleimani dipercaya untuk melaksanakan operasi militer dengan membawa pasukan IRGC dengan menyerang terhadap komplotan pasukan bersenjata *Islamic State in Iraq and the Leviant* (ISIL) yang merupakan bagian dari kelompok yang berafiliasi dengan

organisasi transnasional *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Operasi militer tersebut mulai dilakukan ketika adanya rasa keraguan dari AS untuk melakukan penyerangan terhadap ISIS di tahun 2014. Keraguan AS tersebut berawal dari janjinya untuk mengirimkan bantuan keamanan kepada Baghdad, namun tidak kunjung tiba (Rees et al. 2019).

Atas ketidakjelasan dari tindakan AS menjadikan sebuah momentum bagi Soleimani untuk membantu Baghdad dengan melaksanakan operasi militer dalam menumpas ISIS di Irak dan Suriah. Di saat itu, Soleimani telah mengirimkan sembilan tipe senjata anti-tank kepada Irak sebagai penambahan persenjataan untuk melawan ISIS. Bahkan, Soleimani juga berperan penting dengan membentuk kelompok militer gabungan IRGC dengan Kata'ib Hezbollah, Badr, dan Ashaib Ahli al-Haq secara sukarela untuk membantu militer Irak. Kelompok militer tersebut yang kemudian dikenal dengan Kelompok *al-Hasyd* atau PMF. Hingga pada akhirnya, kelompok PMF yang dipimpin Soleimani berhasil melaksanakan berbagai operasi militer yang dimulai dari pertahanan Kota Amirli, pembebasan Kota Mosul, Jurf al-Sakhar, Diyala, Tikrit, hingga mencapai puncaknya di pertempuran di Fallujah selama tahun 2014 hingga tahun 2019. Akan tetapi, puncak kemenangan Baghdad atas ISIS mulai pada 10 Desember 2017 ketika seluruh kota yang berada di bawah ISIS mampu dibebaskan dengan adanya PMF sebagai kelompok militer gabungan Iran dan Irak yang telah diakui oleh Pemerintah dan Parlemen Irak. Pengakuan tersebut kemudian mendorong IRGC *Al-Quds* di bawah komando Soleimani sebagai mitra keamanan dengan Baghdad untuk terus meningkatkan kekuatan keamanan di Irak hingga tahun 2019 (Abdurrahman, Hamzah, and Kazim 2020).

2.1.2. Pemberian Penghargaan Kehormatan Terhadap Soleimani

Sejak keberhasilan IRGC dalam melakukan penumpasan ISIS dan membentuk bersama PMF sebagai gabungan kekuatan di Irak, Soleimani mampu mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi berupa penghargaan yang diberikan oleh Pemimpin Agung Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Apresiasi tersebut layak diberikan kepada Soleimani atas jasa operasi militer yang telah berhasil dilaksanakan dalam menumpas ISIS di Irak. Penghargaan yang diberikan tersebut dalam bentuk medali kehormatan dengan julukan "*Order of Zolfaghar*" sebagai medali kehormatan khusus pertama kali yang diberikan oleh Rahbar Iran pada tanggal 11 Maret 2019 sejak setelah Revolusi Iran 1979. Pemberian medali kehormatan tersebut juga membuat Soleimani dipromosikan sebagai Letnan Jenderal IRGC Iran. Bahkan, momen tersebut menjadikan Soleimani sebagai tokoh yang berpengaruh bagi Iran, bahkan berpengaruh bagi peranan militer di kancah internasional (Tehran Times Straight Truth 2019).

Keberhasilan Soleimani dalam menaklukkan ISIS di Irak dan pengaruhnya sebagai komandan militer yang meningkat tentu berimplikasi terhadap persaingan kekuatan kedua negara. Hal ini dibuktikan dengan upaya operasi keamanan AS yang begitu lamban, dibandingkan dengan Iran yang pada saat itu mengambil momentum untuk melakukan operasi militer dalam melawan kelompok teroris ISIS. Bahkan, ketika memasuki masa eskalasi hubungan kedua negara tersebut membuat AS menerbitkan suara media Barat yang berisi kecemasan terhadap kelompok militer PMF yang dianggap berafiliasi dengan Iran.

2.1.3. Upaya Intervensi Iran Terhadap Irak

Setelah mencapai keberhasilan atas penumpasan ISIS dan diberikannya medali kehormatan Iran, Soleimani tetap konsisten memiliki hubungan baik dengan Baghdad, Irak. Namun, pada akhir bulan Oktober 2019, Soleimani kembali mengunjungi Irak untuk melakukan rapat dengan para pejabat tinggi keamanan di Irak. Rapat tersebut juga diikuti dengan pertemuan secara internal dengan Hadi al-Amiri, salah satu politisi Irak yang memiliki hubungan kuat dengan aliansi militer PMF sebagai afiliasi dengan IRGC Iran. Pertemuan tersebut bersifat tertutup atau rahasia antara Soleimani dengan Amiri beserta perwakilan dari PMF. Adapun pembahasan pada pertemuan tersebut berupa lobi yang dilakukan oleh Soleimani dengan memberikan nasihat agar Amiri dan PMF untuk tetap mendukung Abdul Mahdi bertahan sebagai Perdana Menteri Irak petahana. Namun, pertemuan rahasia tersebut diketahui oleh lima sumber dari pertemuan sebelumnya dengan Abdul Mahdi. Hal ini dikonfirmasi oleh Pemerintah Iran bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Soleimani itu benar bahwa perjalanan yang dilakukannya ke Irak dan negara-negara di Timur Tengah sebagai upaya dalam memberikan bantuan keamanan. Setelah itu, dilanjutkan dengan adanya koordinasi oleh Soleimani kepada milisi Tehran yang berada di Irak. Koordinasi yang dilancarkan dengan mendatangkan pasukan penembak jitu di setiap atap bangunan Kota Baghdad dalam rangkaantisipasi untuk meredam aksi protes yang dilakukan oleh penduduk sipil Irak (Reuters Staff 2019).

Langkah tindakan yang dilakukan oleh Soleimani tentu menandakan bahwa Iran telah melakukan intervensi secara langsung ke setiap wilayah yang berada di Irak dengan memberikan dampak baru dalam menyebarkan pengaruh

kekuatan Iran di Irak, bahkan di Kawasan Timur Tengah. Sebab, Iran sendiri telah berantisipasi dengan gerakannya yang dianggap membawa sambutan yang tidak baik bagi masyarakat di Baghdad. Antisipasi Iran tersebut benar bahwa kedatangan dari Soleimani beserta rombongan pasukannya dihalangi oleh masyarakat Irak. Masyarakat Irak menuduh bahwa Soleimani dianggap telah berperan intervensi bagi Politik Dalam Negeri Irak. Tuduhan yang dilontarkan oleh masyarakat tersebut didorong dengan adanya aksi protes dengan menolak keras atas upaya campur tangan IRGC Iran kepada Pemerintah Irak yang dianggap masyarakat sebagai pemerintah yang dinilai korupsi dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Bahkan, aksi protes tersebut juga berlanjut hingga di Lebanon dengan melayangkan aksi perlawanan terhadap aliansi yang telah bersekutu dengan Tehran. Membalas dari aksi protes tersebut, Soleimani dengan berani menyatakan, *“We in Iran know how to deal with protests”* di depan para pejabat Pemerintah Irak hingga masyarakatnya (Associated Press (AP) 2019). Balasan tersebut disebabkan dari upaya koordinasi rahasia yang dilakukan oleh Soleimani sebelumnya dengan oknum pejabat Pemerintah dan Keamanan Irak, hingga pasukan aliansinya yang melakukan penjagaan di sekitar wilayah Irak.

2.2. Peristiwa Sekuritisasi Awal AS Terhadap Soleimani

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran mulai memanas kembali sejak tahun 2018. Sejak keluarnya AS dari JCPOA 2015 tentu merupakan upaya represif terhadap Iran dengan menjatuhkan kembali sanksi keamanan dan embargo kepada Iran. Sanksi yang diberikan oleh AS disebabkan dari tuduhan yang dilontarkan oleh AS bahwa Iran tengah menyalahgunakan pengembangan

nuklir sebagai bahan pembuatan alat persenjataan dan juga Presiden Donald Trump menilai bahwa kesepakatan JCPOA atau sebagai *Iran deal* merupakan kesepakatan yang buruk. Alasannya, kesepakatan tersebut dianggap memberikan keuntungan bagi Iran dalam industri teknologi yang kemudian diasumsikan bukan sebagai tujuan yang damai, melainkan adanya upaya peningkatan alat persenjataan nuklir oleh Iran yang dianggap sebagai ancaman bagi AS (Trump 2018). Padahal, alasan tersebut hanya menjadi asumsi bagi Trump dan tentunya jauh berbeda dengan fakta yang terjadi sebagaimana pada konteks dari JCPOA itu sendiri dan implementasinya.

Akibat dari permasalahan tersebut, AS terus memberikan sanksi kepada Iran atas tuduhan yang dilontarkan tersebut. Hal ini kemudian berimplikasi dengan berbagai kasus yang terjadi selama tahun 2019, di mana kedua negara tersebut kemudian melakukan upaya saling menyerang atas Iran yang tidak terima dari tuduhan yang terus disuarakan oleh AS. Upaya perlawanan tersebut membuat AS mengambil langkah tindakan keamanannya dalam bentuk sekuritisasi yang ditujukan secara spesifik kepada Qasem Soleimani. Hal ini dikarenakan adanya ketidakterimaan dari Iran atas tuduhan yang terus dilontarkan oleh Presiden Trump yang berimplikasi atas memanasnya konflik kepada Iran melalui sanksi dan langkah keamanannya. Adapun pelaksanaan langkah sekuritisasi AS diawali terlebih dahulu kepada Iran sebagai objek negara ketika Presiden Trump telah menyatakan Soleimani dan *Iran Revolutionary Guard Corps* (IRGC) sebagai pelaku utama yang menjadikan Iran sebagai ancaman yang nyata melalui kebijakan keamanan resmi dari *whitehouse*. Upaya sekuritisasi awal AS cenderung memberi peringatan kepada Iran bahwa komandan militer khusus Iran

tersebut dianggap berbahaya secara signifikan bagi misi keamanan AS selama di Kawasan Timur-Tengah. Dibuktikan melalui pernyataan dari *Trump's national security adviser*, John Bolton bahwa mulai tanggal 21 Mei 2019, AS sudah mengagendakan sekuritisasi awalnya dengan menambahkan dan membawa pasukan militer AS menuju Teluk Persia sebagai wilayah perbatasan Irak dan Iran terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar AS mengancam akan melawan Iran jika Iran tidak mau bertanggung jawab atas ulah sabotase secara tidak langsung atau *proxy sabotage* yang kerap diperintahkan oleh Soleimani kepada beberapa afiliasi militernya di beberapa negara di Timur-Tengah. Sekuritisasi yang dilakukan oleh AS secara spesifiknya dengan mengirim kelompok armada kapal induk militer AS dan memperkuat persenjataan *Bomber* berjenis B-52 ke Teluk Persia. Lalu, ditambah juga dengan mempersiapkan misil pertahanan patriot dan kapal perang amfibi setelah mendaratkan kapal induk militer AS tersebut (Winter 2019).

Dari langkah sekuritisasi awal tersebut tentu bermuara salah satu fenomena konflik yang terjadi antara AS dan Iran hingga mengakibatkan terjadinya peristiwa atau insiden aksi saling balas dendam antar kedua negara tersebut ketika AS sedang melaksanakan sekuritisasinya terhadap Iran terlebih dahulu yang kemudian tujuannya untuk melaksanakan sekuritisasi kepada Soleimani sebagai agenda utama keamanan AS yang harus dibasmi. Terjadinya aksi balas dendam dalam bentuk saling menyerang tentu dianggap mengganggu sekuritisasi yang dilakukan oleh AS yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

2.2.1. Sekuritisasi Awal Amerika Serikat atas Proxy Sabotage dari Soleimani

Kasus antar kedua negara ini terjadi berawal pada tanggal 19 Mei 2019, di mana terdapat serangan roket jenis Katyusha menghancurkan zona hijau dari lingkungan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Kota Baghdad, Irak. Serangan roket ini berawal dari peluncuran roket yang diduga berasal dari seberang Sungai Tigris, Irak dan belum diketahui secara jelas berasal dari siapa. Serangan roket tersebut tentu mengancam penduduk sipil yang berada di Kota Baghdad, bahkan beberapa objek vital Irak maupun milik Kedubes AS untuk Irak (Hassan and Rubin 2019). Meskipun tidak terdapat korban jiwa secara signifikan dan belum diketahui berasal dari siapa pun, AS semata-mata secara langsung mulai menuduh Iran yang melakukan peluncuran roket tersebut. Penuduhan tersebut disebabkan ketika di tengahnya eskalasi antara AS dengan Iran yang mulai memanas kembali akibat dari kedua pihak yang tidak terima atas permasalahan pada JCPOA di tahun 2018 dan sanksi embargo yang dilakukan oleh AS terhadap Iran.

Akibat dari serangan roket yang tidak diketahui dalangnya tersebut membuat AS mulai melakukan antisipasi dengan melakukan sekuritisasi awal sebagai memberi peringatan kepada Iran dalam bentuk pengiriman pasukan militernya dengan mempercepat pergerakan kapal militer dan pasukan *bomber* AS menuju Teluk Persia. Setelah mencapai di Teluk Persia, pada bulan Juni 2019, militer AS berniat untuk melakukan pembalasan terhadap Iran. Pembalasan tersebut dilakukan dengan mengirimkan pesawat tidak berawak atau dikenal dengan *drone* jenis *RQ-4A Global Hawk* yang melintasi di wilayah udara Selat Hormuz, Iran. Hingga pada saat itu, *Drone* milik AS yang melalui udara Selat

Hormuz kemudian mampu dibendung melalui tembakan oleh kelompok militer elit Iran, IRGC karena *drone* tersebut telah melewati selat tersebut yang menjadi salah satu wilayah yang berada di bawah landasan teritorial Iran (Nadira, Dwiwarno, and Setiyono 2021). Tembakan yang diluncurkan oleh Iran melalui arahan pertahanan dari Soleimani merupakan aksi tindakan bela diri dan pertahanan terhadap serangan yang berasal dari AS.

Selain itu, memanasnya hubungan kedua negara tersebut kemudian berpengaruh ke beberapa negara sekitar. Hal ini dibuktikan dengan langkah dari IRGC Iran melalui Qasem Soleimani yang memiliki rencana operasi militer Iran untuk melakukan penyerbuan pada fasilitas minyak milik Arab Saudi yang diindikasikan memiliki hubungan erat dengan AS dalam bidang perdagangan dan energi, khususnya dalam hubungan dagang komoditas perminyakan. Rencana tindakan tersebut bukan menjadi tindakan langsung oleh Iran, melainkan dengan adanya koordinasi kepada kelompok afiliasinya yaitu Kelompok Bersenjata Houthi yang berada di Yaman untuk meluncurkan serangan *drone* menuju fasilitas minyak tersebut yaitu Saudi Aramco yang berada di Kota Abqaiq, Arab Saudi. Hingga pada akhirnya, fasilitas minyak Saudi Aramco mengalami ledakan yang besar setelah jatuhnya *drone* yang berasal dari Kelompok Houthi pada tanggal 14 September 2019 (Rubin 2020). Sebagaimana yang diketahui bahwa fasilitas minyak tersebut tentu merupakan fasilitas produksi dan penyimpanan minyak terbesar di Arab Saudi. Peristiwa dari serangan *drone* tersebut tentu mengindikasikan bahwa konflik yang dilakukan oleh Houthi, Yaman merupakan bagian dalam *proxy war* antara Iran dan Arab Saudi yang dianggap sebagai salah satu negara Arab yang memiliki hubungan penting dengan AS (Sargent 2019).

2.2.2. Insiden Saling Menyerang Amerika Serikat - Iran selama Desember 2019

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran kian terus meningkat dengan adanya aksi saling menuduh dari fenomena kasus yang terjadi sebelumnya. Bahkan, aksi balasan tuduhan yang dilakukan oleh Iran diindikasikan untuk menghalangi upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh AS terhadap Iran dan Soleimani. Sehingga, eskalasi antar kedua negara tersebut semakin terlihat ketika memasuki bulan Desember 2019 terjadinya berbagai insiden aksi perlawanan akibat dari hubungan kedua negara yang tidak harmonis sejak dahulu. Insiden tersebut juga menjadikan Qasem Soleimani sebagai Komandan IRGC Al-Quds Iran dan Presiden AS Donald Trump sebagai pengaruh pada kepentingan kekuatan keamanan yang terjadi hingga mengakibatkan AS bersedia untuk melakukan aksi penyerangan terhadap Soleimani. Adapun beberapa insiden yang terjadi selama bulan Desember 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Serangan roket terhadap Pangkalan Udara K-1 di Kirkuk
Pangkalan Militer Udara K-1 yang berada di Kota Kirkuk, Irak merupakan pangkalan militer dari pasukan AS yang memiliki kerjasama dengan pasukan Irak. Akan tetapi, pada tanggal 27 Desember 2019, pangkalan militer tersebut kemudian dihantam oleh serangan roket pertama yang tidak diketahui berasal dari kelompok militer yang bersifat misterius (Nugroho 2019). Akibat dari serangan tersebut, salah satu kontraktor sipil asal AS tewas dan beberapa personel militer AS dan Irak mengalami luka-luka. Meskipun bersifat misterius, AS secara langsung kembali menuduh kepada kelompok militer *Popular*

Mobilization Forces (PMF) yang dianggap menjadi *supporting system* kekuatan militer IRGC Iran. Salah satu kelompok PMF yang dituduh yaitu Kata'ib Hezbollah, di mana Hezbollah masih berafiliasi dengan IRGC Iran (Reuters Staff 2019).

Dari tuduhan tersebut juga AS mengindikasikan bahwa serangan roket tersebut berasal dari kelompok militer PMF yang bermayoritas Syiah memiliki hubungan dengan Iran. Hal tersebut membuat Pemerintah AS melalui pernyataan yang disampaikan oleh Mike Pompeo, *US Secretary of State* atau Menteri Luar Negeri AS bahwa secara resmi, Iran telah dinyatakan bersalah atas tindakan melakukan penyerangan di Irak dan bersedia untuk memberikan balasan yang bersifat eksplisit atau upaya tegas oleh AS terhadap ulah dari Iran (McLaughlin and Martinez 2019).

- Serangan balasan AS terhadap Kata'ib Hezbollah sebagai Afiliasi Iran
Setelah terjadinya penyerangan roket terhadap pangkalan militer AS di Irak kemarin, AS berniat untuk memberikan balasan serangan terhadap PMF yang dianggap sebagai afiliasi Iran pada tanggal 29 Desember 2019. Serangan balasan yang dilakukan berupa penggunaan pesawat jenis *Air Force F-15E* untuk menjatuhkan rudal tembakan di lima target yang berada di wilayah Irak dan Suriah. Lima target yang dituju tentu diyakini oleh AS bahwa lima wilayah tersebut sebagai tempat yang dikontrol oleh Kata'ib Hezbollah sebagai bagian dalam PMF dan komunitas Syiah sebagai imigran dari Iran. Serangan yang dilakukan bertujuan untuk mencegah upaya operasi militer Iran yang dianggap membahayakan bagi Kawasan Timur Tengah (Barnes 2019).

Akibat dari serangan udara tersebut, terdapat 25 korban tewas dan 51 korban mengalami luka-luka yang berada di lima wilayah sebagai target AS tersebut. Atas kejadian tersebut, Iran memberikan peringatan kepada AS dan menuduh mereka telah melakukan serangan secara illegal. Bahkan, Abbas Mosavi, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Iran turut meminta pertanggungjawaban kepada militer AS atas konsekuensi yang telah dilakukan dan dianggap telah menunjukkan kelalaiannya atas upaya operasi AS untuk menumpas ISIS di Irak (Guy 2019). Hal ini membuat sebagian pasukan PMF, termasuk Hezbollah dan sebagian pasukan IRGC *Al-Quds* Iran yang berada di Irak berniat untuk melakukan pembalasan kembali.

- Serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad

Serangan ini menjadi puncak pada eskalasi konflik antara AS terhadap Iran selama tahun 2019. Secara kronologi, pada tanggal 31 Desember 2019, masyarakat pendukung Hezbollah bersama dengan beberapa pasukan PMF dan masyarakat Irak yang berpihak kepada Iran melakukan mobilisasi terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad. Mobilisasi tersebut dalam bentuk demonstrasi dan penyerbuan di lokasi zona hijau Kedubes AS di Baghdad, di mana demonstran tersebut menyuarakan kepada pihak AS yaitu "*Death to America!*" dan dilanjutkan dengan aksi vandalisme terhadap fasilitas Kedubes AS Baghdad tersebut (Harding 2019). Upaya tindakan yang dilakukan sebagai balasan atas dendam dari serangan yang telah dilakukan oleh AS terhadap pemukiman PMF yang berada di Irak dan Suriah.

Peristiwa tersebut membuat Presiden AS Donald Trump menyatakan Iran harus bertanggung jawab secara penuh atas kejadian tersebut. bahkan, Trump juga mulai mengerahkan para pasukan AS untuk memulai mengukur target pada *drone* yang mereka miliki terhadap Iran. Hal ini dibuktikan dengan janji akan membalas terhadap Iran yang dianggap sebagai ancaman melalui pernyataan yang disampaikan dalam media sosial *twitter* di masa pergantian tahun 2019 menuju 2020 (Burns and Knickmeyer 2020).

BAB III
IMPLEMENTASI KONSEP SEKURITISASI AMERIKA SERIKAT
TERHADAP SOLEIMANI

Setelah membahas mengenai dinamika yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran dan Qasem Soleimani, terdapat beberapa langkah dan upaya dari Amerika Serikat terhadap eskalasi yang terjadi dengan Iran pada tahun 2019. Berbagai dinamika yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran mengakibatkan konflik antar kedua negara tersebut yang terus mengalami eskalasi. Upaya keamanan dan tindakan yang dilakukan oleh Iran membuat AS mengalami adanya persaingan kekuatan militer yang kerap melakukan dominasi di beberapa wilayah Kawasan Timur Tengah. Hal ini membuat AS mengalami hambatan ketika upaya hegemoni yang dilaksanakan pada kawasan tersebut.

Bukan hanya adanya persaingan kekuatan saja, melainkan AS merasa terganggu dengan berbagai aksi yang diambil alih oleh *Iran Revolutionary Guard Corps* atau IRGC atas agenda kepentingannya terhadap Kawasan Timur-Tengah. Dari permasalahan tersebut tentu terdapat implementasi dalam bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden AS Trump dalam menghadapi Iran yang telah diberikan sanksi atas penolakan pada *Joint Comprehensive Point of Action* (JCPOA) atau perjanjian nuklir yang telah disahkan secara bersama oleh AS di masa sebelumnya. Ketika AS beralih di bawah kendali Trump, terdapat langkah dalam pengambilan kebijakan dan tindakan yang bersifat kontroversi. Apalagi, selama tahun 2019 hingga awal 2020 ini menjadi masa titik puncak pertengahan memanasnya antara AS dengan Iran. Bahkan, AS sangat menyoroti terhadap

peran Soleimani yang dianggap menjadi ancaman hingga mengakibatkan AS mengambil langkah untuk dijadikan sasarannya semenjak dinamika tersebut kerap terjadi di akhir tahun 2019.

Dengan begitu, pada pembahasan kali ini akan mengkaji analisis pada implementasi yang dilakukan oleh AS dalam perspektif sekuritisasi terhadap Iran. Namun, kajian yang akan dilakukan secara spesifik untuk mengetahui langkah AS dalam segi kebijakan, pengaruh, dan tindakan yang dilakukannya dalam berperan pada kasus pembunuhan Soleimani yang kemudian dipadukan dengan tingkat unit analisis sekuritisasi berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Buzan dan Weaver. Sebagai gambaran awal, sekuritisasi diartikan dengan berbagai peran yang dilakukan dalam rangka menjalankan kepentingan politik yang diimplementasikan dalam urusan keamanan. Segala isu yang terjadi antara upaya sekuritisasi AS terhadap Iran dan Soleimani tentu memerlukan jarak spektrum dari yang bersifat non-politik menjadi isu yang telah dipolitisasikan melalui pengaruh yang dibawakan oleh AS dalam ranah geopolitik di Timur-Tengah.

3.1. *Referent Object* pada Sekuritisasi Terhadap Iran dan Soleimani

Sejak gagalnya JCPOA yang telah disepakati tahun 2015, AS mulai menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran pada tahun 2018. Alasan tersebut dikarenakan Iran dianggap tidak mematuhi perjanjian tersebut dan memberikan keuntungan bagi Iran untuk menyalahgunakan persenjataannya. Akan tetapi, alasan dari AS tersebut dapat dikatakan bersifat general saja. Trump sejak awal telah memiliki dugaan bahwa Iran merupakan salah satu negara yang terancam

baginya. Bahkan, Trump mampu mengubah skema politik yang awalnya bersifat diplomatis hingga menjadi suatu hal yang menimbulkan politisasi terhadap keamanan negara. Dengan pemikiran dan *speech act* yang dibawakan Trump tentu membuat terjadinya eskalasi hubungan antara AS dengan Iran yang saling bertolak belakang hingga menimbulkan konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran yang dilakukan Trump sebagai Presiden AS tentu sangat berpengaruh terhadap Iran yang mengakibatkan terjadinya perlawanan dan insiden. Hingga pada akhirnya, *referent object* yang ditujukan oleh AS yaitu Iran yang kemudian dijadikan sebagai ancaman bagi kepentingan AS. Selain itu, AS juga menempatkan Soleimani sebagai ancaman karena dianggap berpengaruh bagi hubungan keamanan antar kedua negara tersebut. Permasalahan tersebut kemudian akan diketahui berbagai implementasi sekuritisasi yang dilakukan oleh AS terhadap Iran yang kerap dianggap sebagai *referent object*.

Referent object pada pelaksanaan sekuritisasi AS mengarah kepada Iran yang dijadikan sebagai ancaman eksistensial melalui *speech act* Trump sejak awal telah menganggap Iran sebagai *referent object* berupa ancaman bagi AS yang begitu membahayakan kepentingannya bagi Timur-Tengah. Hal tersebut dibuktikan sejak awal ketika Trump pada masa awal kepemimpinannya di tahun 2016 telah berjanji untuk mencabut JCPOA dan pemberian sanksi kepada Iran. Trump melalui *speech act* pada kampanyenya menyatakan bahwa JCPOA Iran tersebut merupakan kesepakatan nuklir yang dapat menimbulkan bencana besar bagi dunia internasional. Lalu, bukan hanya dianggap sebagai bencana, melainkan kesepakatan yang ditandatangani secara bersama AS dan Iran dianggap sebagai kesepakatan yang sangat buruk dan mengkhawatirkan jika Iran telah

mengembangkan sumber nuklirnya untuk mengembangkan persenjataan atom, meskipun Iran membantah pernyataan dari AS tersebut. Tidak hanya menganggap kesepakatan yang buruk dengan Iran, tetapi juga Trump melalui pidato yang disampaikan bulan Maret 2016 di kelompok *American Israel Public Affairs Committee* (AIPAC) atau lobi pro-Israel bahwa menarik diri dari JCPOA dan melakukan perlawanan dengan Iran akan menjadi prioritas yang sangat diutamakan (Torbaty 2016). Setelah itu, diikuti dengan pemberian sanksi AS terhadap Iran yaitu memblokir sektor keuangan dan perdagangan minyak kepada Iran. Pemblokiran tersebut ditujukan kepada seluruh perusahaan di Iran yang telah memiliki hubungan kerja sama dengan IRGC *Al-Quds* masa komando Soleimani untuk dijadikan sebagai biaya peningkatan bahan perancangan senjata dan aksi *proxy war* terhadap AS (Wambrauw and Apintamon 2021).

Selain itu, anggapan Iran dan Soleimani sebagai ancaman bagi AS diperkuat dengan peristiwa yang terjadi selama tahun 2019, seperti adanya serangan roket Katyusha yang diduga oleh AS bahwa roket tersebut berasal dari Iran, serangan drone yang diluncurkan oleh kelompok PMF yang dianggap sebagai kelompok militer afiliasi dengan IRGC Soleimani, serangan bersenjata maupun non-bersenjata antara AS dan Iran yang berada di Baghdad, Irak, hingga kekhawatiran AS terhadap berbagai langkah operasi militer IRGC Soleimani ke beberapa negara, seperti Irak, Suriah, hingga Arab Saudi. Segala permasalahan tersebut tentu memperkuat kasus yang dialami selama masa Trump terhadap Iran dari berbagai aksi yang dianggap membahayakan. Hal ini menjadikan dasar awal atas keyakinan dari pemikiran dan langkah AS dalam melaksanakan proses sekuritisasinya terhadap *referent object* yang dituju dengan menitikberatkan Iran

sebagai ancaman yang bersifat eksistensial dengan memberikan dampak yang berpengaruh terhadap kepentingan yang dilakukan oleh AS sebagai upaya untuk melakukan tindakan sekuritisasinya terhadap Soleimani. Namun, berbagai kasus yang terjadi membuat pelaksanaan sekuritisasi yang dilakukan oleh AS hanya berdasarkan pada penilaian yang begitu subjektif sebab konflik yang terjadi antara AS dan Iran tentu menimbulkan persepsi yang berbeda. Persepsi yang berbeda tersebut tentu membuat AS memanfaatkan pelaksanaan sekuritisasinya dengan memanfaatkan langkah politisasi keamanan AS terhadap Iran sebagai negara yang ditempati oleh IRGC Soleimani yang telah menjadi bagian agenda politik Trump yang telah dijanjikan sejak dimasukkan ke dalam agenda keamanan *whitehouse* di Timur-Tengah (Trihartono, Indriastuti, and Nisya 2019).

Pengaruh pada objek sekuritisasi AS bukan hanya menitikberatkan Iran dan Soleimani sebagai ancaman saja, tetapi juga berpengaruh pada dua indikator yang memiliki hubungannya dengan sekuritisasi yang dilakukan oleh AS terhadap Iran. Adapun beberapa indikator tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- Hubungan Geopolitik antara AS dan Iran

Meskipun kedua negara tersebut berada dalam kawasan yang berbeda, tetapi hubungan geopolitik AS sangat berpengaruh terhadap Iran. Geopolitik antar kedua negara tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan intervensi yang dilakukan oleh AS era Trump di Timur Tengah dengan melakukan perlawanan secara langsung maupun dalam bentuk *proxy war*. Adapun *proxy war* yang dilakukan oleh AS cenderung meningkatkan kerjasama dengan beberapa negara yang berada di Timur Tengah, seperti Israel, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kerjasama yang dilakukan oleh

AS tentu memberikan dampak geopolitik yang sangat berpengaruh, di mana ketiga negara tersebut tentu bersebrangan dengan Iran atas berbagai tindakan operasi militer yang sangat dirugikan, seperti tindakan dari kelompok bersenjata Houthi, Yaman yang melakukan penyerangan terhadap fasilitas minyak Saudi Aramco yang berada di Arab Saudi pada tahun 2019, di mana tindakan penyerangan tersebut dianggap oleh AS atas perintah *proxy sabotage* dari IRGC, Iran yang memiliki hubungan kerjasama dengan kelompok bersenjata tersebut (Jose and Fathun 2021).

Dari permasalahan tersebut tentu berpengaruh pada kaitannya dengan geopolitik antara AS dan Iran yang terindikasi dengan adanya persaingan kekuatan keamanan antar kedua negara tersebut, di mana AS dan Iran tentu memiliki hegemoni terhadap beberapa negara di Timur-Tengah.

- **Kepentingan Keamanan yang Berlawanan**

Selain itu, indikator adanya persaingan kekuatan antara AS dan Iran juga dipengaruhi dengan kepentingan kedua negara yang berlawanan. Analisis dari indikator tersebut diperkuat dengan berbagai kasus yang terjadi antara AS dan Iran dalam kaitannya dengan urusan keamanan militer yang saling berlawanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya operasi militer yang dilakukan oleh Soleimani dalam menumpas beberapa pasukan ISIL di Irak. Namun, di balik dari kepentingan tersebut justru membuat AS mulai mengecam terhadap tindakan yang dilakukan oleh IRGC secara tidak langsung melalui eskalasi konflik yang terjadi dalam bentuk *military deterrence*. Sebab, tanpa disadari bahwa berbagai alat persenjataan yang dimiliki oleh ISIL berasal dari kelompok militer afiliasinya yaitu FSA

(*Free Syrian Army*) dari Suriah yang pada realitanya memiliki hubungan dekat dengan AS di masa itu (O'Connor et al. 2017).

Pada intinya, *speech act* yang disuarakan oleh Trump tentu berpengaruh dengan perannya sebagai aktor sekuritisasi dengan menitikberatkan Iran dalam segi *referent object* sebagai ancaman eksistensial bagi AS, khususnya Soleimani yang juga ikut serta baik melalui kepentingannya maupun adanya persaingan hegemoni yang terjadi di Timur Tengah. *Speech act* terhadap *referent object* kemudian berpengaruh pada langkah implementasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam melaksanakan tindakannya, meskipun terdapat beberapa tindakan AS yang dianggap menimbulkan pro dan kontra, seperti pengambilan langkah kebijakan terhadap Soleimani. Sebab, Soleimani juga dijadikan sebagai bagian ancaman bagi AS atas keterlibatannya, baik berkaitan dengan kepentingan AS maupun operasi militer yang dilakukannya dalam melawan ISIS. Keterlibatan Soleimani juga dianggap menjadi pengaruh bagi Iran mengingat Soleimani telah dianggap sebagai komandan militer tertinggi IRGC dan memiliki peranan dalam membebaskan negara tetangganya, seperti Irak dan Suriah dari pendudukan ISIL sejak tahun 2014. Peranan yang dilakukan Soleimani dianggap mengganggu upaya intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap kedua negara tersebut (al-Sudani 2015).

3.2. Amerika Serikat sebagai Aktor Sekuritisasi Terhadap Soleimani

Selain mengambil peran dalam menghadapi Iran sebagai objek referensi, AS juga memiliki peranan sebagai aktor yang melakukan sekuritisasi terhadap

Iran dan Soleimani. Peran sekuritisasi yang dilakukan oleh AS bukan hanya menitikberatkan pada langkah Pemerintah AS atau *whitehouse* saja, tetapi terdapat pernyataan yang disampaikan oleh elite politik yang berasal dari Partai Republikan.

3.2.1. Amerika Serikat memberi Labelling Qasem Soleimani dan IRGC sebagai bagian dalam Foreign Terrorist Organization (FTO)

Sejak dinamika antara AS dan Iran terus mengalami peningkatan, AS memandang bahwa ancaman yang dilakukan oleh Iran perlu dicegah dengan mengambil tindakan yang tegas. Tindakan tersebut bermula dengan pemberian sanksi embargo terhadap Iran yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kebijakan AS dalam rangka untuk meredam dari berbagai langkah dari Iran yang dianggap memberikan ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Pada tanggal 8 April 2019, Presiden Donald Trump melalui *speech act*nya kembali telah mengambil sebuah kebijakan melalui pidato resminya di *Whitehouse*, Washington D.C. Kebijakan yang disampaikan oleh Trump tentu menimbulkan berbagai kontroversi di dunia internasional yaitu secara pertama kali menetapkan kelompok militer resmi negara Iran, IRGC termasuk Pasukan Al-Quds yang dipimpin oleh Qasem Soleimani sebagai kelompok teroris yang dikategorikan dalam *Foreign Terrorist Organization* (FTO). Lalu, Trump juga menambahkan alasannya bahwa kebijakan luar negeri tersebut didasari dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh IRGC telah melanggar dasar hukum berupa Pasal 219 Undang-Undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan AS Amandemen Tahun 2011 (Trump 2019).

Konteks dari pasal perundang-undangan yang disebutkan tersebut mengacu pada Titel 8 *United States Code* (U.S.C.) 1189 tentang *Designation of Foreign Terrorist Organizations*, bagian A, ayat (1), huruf a, b, dan c yang berbunyi:

The Secretary is authorized to designate an organization as foreign terrorist organization in accordance with this subsection if the Secretary finds that:

- a. the organization is a foreign organization;*
- b. the organization engages in terrorist activity (as defined in section 1182 (a)(3)(B)) of this title or retains the capability and intent to engage in terrorist activity or terrorism;*
- c. the terrorist activity or terrorism of the organization threatens the security of the United States national or the national security of the United States.”* (The Senate and House of Representatives of the United States of America 2011)

Mengidentifikasi dari penjelasan pada dasar hukum AS tersebut kemudian dipadukan dengan penetapan IRGC dan Soleimani dikategorikan termasuk dalam FTO. Dalam kaitannya, IRGC dianggap sebagai salah satu organisasi militer yang bersifat mengancam bagi militer AS ketika menjalankan operasi keamanan sebagai bagian dalam kepentingan politik keamanan AS terhadap Kawasan Timur Tengah. Penetapan kebijakan tersebut menjadikan awal langkah Pemerintah AS atau *whitehouse* termasuk Presiden Trump menjadi aktor peranan utama dalam melaksanakan sekuritisasinya dalam melakukan perlawanan terhadap IRGC Soleimani secara spesifik. Artinya, melalui penetapan kebijakan AS mengindikasikan bahwa AS telah melegitimasi Soleimani yang dianggap telah melanggar hukum menurut kepentingan keamanan AS di Timur Tengah.

3.2.2. *Berbagai Pernyataan Para Elit Berkepentingan Amerika Serikat yang Ikut Serta*

Langkah pengambilan kebijakan penetapan Soleimani sebagai teroris yang disampaikan oleh Pemerintahan AS bukan hanya sebagai salah satu langkah awal sekuritisasi AS yang akan dilancarkan saja. Akan tetapi, terdapat beberapa kalangan elit politik dari AS juga memberikan tanggapan dan pernyataan dalam rangka melancarkan upaya sekuritisasi AS terhadap Soleimani. Keterlibatan dalam melaksanakan sekuritisasi juga diikuti dengan sanggahan kembali oleh *U.S. Secretary of State*, Mike Pompeo melalui ungkapan secara resmi menyatakan bahwa AS meminta agar negara yang bersekutu dengannya harus mengambil tindakan yang serupa. Pompeo mengklaim bahwa pengambilan keputusan Pemerintah AS dalam mengkategorikan IRGC sebagai kelompok teroris asing semata-mata bertujuan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi rakyat Iran agar mereka bisa meraih kebebasannya. Tidak lupa juga, AS terus berupaya untuk memberikan hukuman kepada Iran agar negara tersebut mampu menahan diri dan berperilaku selayaknya secara normal dalam ranah internasional (BBC News 2019).

Setelah itu, berkaitan dengan Qasem Soleimani, dalam pengumuman yang disampaikan oleh *U.S. Secretary of State*, sempat ditanyakan oleh salah satu pihak media yang hadir dalam sikap pernyataan dari Mike Pompeo. Pihak media tersebut yaitu Media Al-Arabiya dengan Wartawan Nadia Bilbassy memberikan sebuah pertanyaan mengenai pelabelan IRGC telah dimasukkan ke dalam daftar FTO yang kemudian disinggung dengan Qasem Soleimani yang dijadikan sebagai target oleh AS sebagaimana pada masa sebelumnya AS pernah

menetapkan Abu Bakar al-Baghdadi. Mendengar pernyataan tersebut, Mike Pompeo tanpa memberikan komentar panjang dan mengonfirmasi bahwa benar dan meminta seluruh awak media menanyakan secara detail kepada Departemen Keamanan pada pelaksanaan yang akan dilakukannya (Pompeo 2019).

Selain itu, pernyataan dari elite politik pemerintahan AS juga diperkuat dengan kalangan elite politik Partai Republican AS yang sangat mendukung dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Trump. Bahkan, Partai Republican AS juga siap ikut serta jika POTUS mengambil tindakan dengan membunuh Soleimani yang dianggap sebagai salah satu misi penting untuk mengurangi eskalasi yang diduga oleh AS kerap berulah atas operasi militer yang dilakukannya. Beberapa politisi dari Republican, seperti Rick Scott menganggap Soleimani sebagai salah satu monster terjahat di dunia melalui pandangannya yang disampaikan dalam kongres bipartisan yang diadakan di Florida, AS. Diikuti dengan Stephanie Murphy yang menyatakan bahwa Soleimani akan bertemu dengan masa kematiannya (Contorno 2020).

3.3. Qasem Soleimani sebagai *Functional Actor*

Setelah mengetahui AS sebagai aktor sekuritisasi dan Iran sebagai bagian dalam *referent object*, kedua pendekatan tersebut pastinya disebabkan dari salah satu aktor yang dianggap memberikan pengaruh secara signifikan terhadap AS maupun Iran. Aktor tersebut yang dikenal sebagai *functional actor* atau aktor fungsional. Dalam analisis studi kasus ini, AS sebagai aktor sekuritisasi dalam mengacu *referent object* yang menunjukkan Iran sebagai ancaman eksistensial,

namun seluruh isu keamanan yang terjadi bermuara dari Qasem Soleimani. Dengan begitu, sekuritisasi AS terhadap Iran menunjukkan bahwa Soleimani dianggap sebagai aktor yang bertanggung jawab dari memanasnya kedua negara tersebut. Artinya, Soleimani dianggap sebagai aktor fungsional yang membuat konflik antara AS dan Iran mengalami eskalasi selama tahun 2019 - 2020.

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa inti objek dalam studi kasus yaitu berbagai hal yang telah dilakukan oleh Soleimani selama memegang jabatannya sebagai Komando IRGC dalam divisi Al-Quds, di mana salah satu sub-kelompok militer yang memiliki urusan dalam keamanan regional hingga skala internasional. Berbagai hal yang dilakukan oleh Soleimani tentu menjadi suatu hal yang baru, di mana Soleimani menjadi sasaran utama bagi AS dengan melabelinya sebagai terorisme melalui pengambilan kebijakan resminya. Pemberian label teroris tersebut tentu akan dibuktikan dengan pengaruh, sebab, akibat, hingga langkah dari Soleimani yang dapat memberikan dampak bagi AS dalam memperkuat tindakan sekuritisasinya dengan disertai pada strategi yang dilaksanakannya.

Selanjutnya, Qasem Soleimani tentu memiliki berbagai sepak terjang yang dilakukannya selama masa konflik antara AS dan Iran sejak masa Revolusi Islam Iran 1979. Namun, kiprah Soleimani semakin terlihat ketika ia diangkat sebagai Komando IRGC divisi Al-Quds pada tahun 1998 yang dianggap sebagai kelompok militer yang memiliki power yang kuat dalam pertahanan dan keamanan Iran. Salah satu sepak terjang yang dilakukan oleh Soleimani pertama kali yang berurusan dengan AS yaitu ketika terjadinya invasi AS terhadap Irak di masa Presiden Saddam Hussein pada tahun 2003, Soleimani mulai membentuk

kelompok militer kecil dengan merekrut masyarakat Syiah bergabung dalam IRGC yang berada di Irak untuk mencegah intervensi pendudukan dari AS.

Kemudian, dilanjutkan dengan mobilisasi yang dilakukan oleh Soleimani melalui IRGC terhadap milisi kecil Syiah dan mengajak Hezbollah untuk mengintervensi Suriah dalam rangka membela Pemerintah Suriah di era kepemimpinan Presiden Bashar al Assad pada tahun 2011 atas intervensi yang dilakukan oleh AS. Hingga pada masa puncak peran sepak terjang beliau yaitu ikut serta untuk membentuk kelompok militer gabungan milisi Syiah dan IRGC yang dikenal dengan PMF pada tahun 2014 dengan menyusun sebanyak 100.000 pasukan semi-militer yang tergabung dalam rangka menumpas pasukan ISIS dan AS yang berada di Irak. Pembentukan PMF ini juga tidak luput dari upaya lobi yang dilakukan oleh Soleimani untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Irak di masa Haider al-Abadi (Nakhoul 2020).

Berbagai sepak terjang yang dilakukan oleh Soleimani tentu bertujuan untuk melaksanakan operasi keamanan di Timur Tengah dengan memberikan perlindungan bagi Irak dan Suriah atas rezim dan terorisme yang bertolak belakang dengan Syiah. Akan tetapi, berbeda dengan AS bahwa tindakan dan kiprah yang dilakukan oleh Soleimani dianggap mengganggu dan membahayakan kepentingan keamanan AS. Hal tersebut kemudian mendorong Trump untuk membentuk sebuah kebijakan dengan menyatakan Soleimani dan IRGC sudah masuk ke dalam FTO dan dianggap sebagai terorisme yang mengancam AS dan Timur-Tengah. Adapun tujuan Trump mengambil kebijakan tersebut yaitu Soleimani selama memimpin IRGC telah menimbulkan kekerasan yang

mengakibatkan ratusan pasukan militer dan sipil AS tewas dan mengalami luka-luka.

Melalui pendekatan Copenhagen School juga, Soleimani digambarkan oleh AS sebagai teroris yang mengancam bagi beberapa masyarakat AS di Timur Tengah, seperti penggunaan *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi terhadap *referent object* dengan menuduh Soleimani telah melancarkan aksi serangan terorisme terhadap penduduk sipil hingga menaruh beberapa bom di beberapa titik wilayah. Bahkan, puncak konflik terjadi ketika AS mulai menyatakan untuk menyerang IRGC dalam rangka menghentikan pengaruh sepak terjang Soleimani yang dianggap harus bertanggung jawab atas kematian dari empat kontraktor sipil AS di Kirkuk, Irak dari serangan rudal yang diluncurkan pada tanggal 27 Desember 2019. Dengan demikian, AS menganggap Soleimani adalah dalang yang memberikan dampak kerugian kepentingan AS di Irak dan Suriah (Zanotti and Thomas 2020).

3.4. *Breaking Free of Rules* dan Sekuritisasi Amerika Serikat

Berbagai analisis pendekatan pada sekuritisasi AS akan menimbulkan sebuah jawaban bagaimana penerapan sekuritisasi yang dilakukan oleh AS terhadap Soleimani. Namun, mengingat kembali bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi tentunya memiliki tujuan dengan tiga komponen dari pendekatan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti adanya ancaman eksistensial, langkah tindakan atau aksi yang bersifat darurat, hingga efek akibat yang timbul pada hubungan antara AS dan Iran. Beberapa komponen tersebut

kemudian menimbulkan dengan adanya *breaking free of rules* atau pelanggaran aturan yang dilakukan oleh AS yang bersifat anomali pada pelaksanaan sekuritisasi secara umumnya. Sebab, langkah yang diambil oleh AS tentu merupakan keamanan yang telah dipolitisasi oleh pemimpinnya sendiri, Trump (Floyd 2016).

Pernyataan mengenai ancaman eksistensial tersebut pada kasus ini dibuat oleh AS dengan menyatakan ancaman Soleimani dapat menghalangi kepentingan keamanannya sehingga AS melegitimasi Iran hingga Soleimani yang menganggap dua hal tersebut yang perlu ditumpas. Seperti pengambilan langkah AS terhadap Soleimani dalam kebijakan resmi negaranya dengan konteks sebagai bagian dalam *war on terrorism*. Apapun tindakan yang diambil oleh AS berasal dari pernyataan dan argumen yang disampaikan oleh Trump sebagai bagian instruksi bagi jajaran AS untuk mengambil upaya implementasi tersebut. Sehingga, sekuritisasi yang dilakukan AS tentu berimbas pada langkah yang bersifat *breaking free of rules* dengan makna lain seolah-olah AS telah menempatkan dirinya merasa terancam dari serangan yang telah dilakukan oleh lawannya, meskipun posisi AS tersebut hanya didasari dengan argumen oleh elite politik yang berada di *whitehouse*. Hal ini dapat disanggah dengan dua implementasi yang dilakukan oleh AS yang dianggap termasuk dalam *breaking free of rules* dalam sekuritisasi.

3.4.1. Pembunuhan Soleimani dan Sekuritisasi Amerika Serikat

Segala sanksi yang dijatuhkan oleh AS kepada Iran membuat AS mengambil salah satu langkah implementasi untuk mengakhiri eskalasi konflik yang terjadi. Hal yang dilakukan AS melalui Trump pada awal tahun 2020 memberikan instruksi kepada Departemen Keamanan atau Pentagon untuk

membunuh Soleimani yang dianggap terlibat pada penyerangan Iran terhadap AS di Kirkuk dan Baghdad, Irak pada tanggal 27 - 31 Desember 2019, baik yang menimbulkan korban bagi pasukan AS maupun aktor diplomasi di kedutaannya. Langkah lanjutan tersebut menjadi sebuah balas dendam yang dilakukan oleh AS terhadap Soleimani yang bertujuan dalam rangka melindungi masyarakatnya dari serangan teroris IRGC yang telah direncanakan (U.S. Department of Defense 2020).

Hingga pada peristiwa, pada tanggal 3 Januari 2020, serangan drone yang diluncurkan kemudian menghantam rombongan Soleimani dan pasukannya di Bandara Internasional Baghdad, Irak ketika rombongan Soleimani hendak bertemu Perdana Menteri Irak, Adil Abdul Mahdi. Serangan tersebut mengakibatkan sepuluh orang tewas, termasuk Qasem Soleimani. Kematian Soleimani tentu berlawanan dengan langkah pilihan sekuritisasi AS untuk meredam konflik, melainkan konflik AS dan Iran semakin meningkat. Pasca kejadian tersebut, Iran menyatakan duka yang mendalam atas kehilangan sosok berpengaruh kedua di Iran setelah pemimpin agung Iran, Ali Khamenei (BBC News 2020). Menurut AS, pembunuhan Soleimani merupakan salah satu pencapaian alternatif yang sukses diimplementasikan untuk mencegah upaya yang dilakukan oleh Iran melalui IRGC sebagai dalih AS agar mampu memuluskan hegemoninya di Timur Tengah. Serta, dalam Teori Sekuritisasi juga tindakan suatu negara yang melegitimasi sebuah objek atau aktor kemudian mendorong aktor sekuritisasi mengambil tindakan dengan cara tersendiri yang merupakan langkah terbaik. Langkah hegemoni AS tersebut tentu kemudian menimbulkan perdebatan dalam segi sekuritisasi yang dilaksanakannya.

3.4.2. Faktor Penggunaan *Speech Act* dan Pelanggaran Hukum Amerika Serikat Tentang Pembunuhan Soleimani

Setelah terjadinya pembunuhan terhadap Soleimani, efek akibat yang ditimbulkan oleh AS sebagai aktor yang melaksanakan sekuritisasi melalui pengambilan kebijakan, sanksi yang diberikan, implementasi sekuritisasi terhadap Soleimani sangat berkesinambungan dengan pengambilan upaya *breaking free of rules* dalam pelaksanaannya dalam ranah internasional. Masalahnya, melalui *speech act* oleh Trump dengan kebijakan yang mempengaruhi meningkatnya *maximum pressure* AS terhadap Iran yang dikategorikan penyalahgunaan intervensi yang sangat jelas. Seperti yang terjadi pasca-pembunuhan Soleimani, Trump menganggap bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh AS memang sudah dilatarbelakangi dengan isu kejadian dan kepercayaan dirinya yang kuat untuk melakukan tindakan represif terhadap Iran dengan memilih untuk membunuh Soleimani dengan menyatakan merupakan aksi *self-defense* yang dilakukan AS untuk melaksanakan sekuritisasinya dalam bentuk '*war on terrorism*' (Chung 2020).

Akan tetapi, AS tetap bersikukuh yakin bahwa langkah tindakan yang dikategorikan ke dalam *breaking free of rules* pada perspektif sekuritisasi merupakan tindakan yang benar dan sesuai dalam implementasi *self-defense* terhadap Soleimani. Keyakinan tersebut dibuktikan dengan argumen Trump pada *speech act*-nya di tanggal 14 Januari 2020 saat melakukan pawai kampanye di Milwaukee, Wisconsin bahwa Trump mengindikasikan Soleimani adalah raja dari segala pengeboman dan penyerangan yang membuat sebagian masyarakat AS

diibaratkan kehilangan dari kaki dan tangannya akibat dari ulah tindakan Soleimani itu sendiri. Bahkan, Trump juga sempat menyatakan dengan bahasa yang tidak pantas bahwa Soleimani disebut “*son of a b*tch!*” (Garger 2020). Dari berbagai *speech act* yang dilontarkan oleh Trump sebagai aktor utama AS dalam mengimplementasikan sekuritisasi terhadap Soleimani tentu menimbulkan pengaruh pada posisi AS dalam mengkonstruksi ancaman melalui sebuah tindakan keamanan berdasarkan kapabilitas dan kekuatan yang menimbulkan upaya yang tidak teratur. Bahkan, konstruksi yang dibangun oleh Trump yaitu berdasarkan dari kepercayaan dirinya dalam melakukan *framing* berbagai isu yang menyangkut Iran dan Soleimani dengan legitimasi berupa tuduhan sebagai pelanggar hukum dan pelaku kejahatan terorisme yang mengancam penduduk AS yang berada di Irak dan Suriah. Hingga pada intinya, perspektif yang dibangun oleh Buzan dan Weaver juga berkaitan seperti peranan AS sebagai aktor sekuritisasi yang mengekang tindakan terhadap Iran dan Soleimani dengan membebaskan tindakannya sendiri, sehingga AS juga melakukan *breaking free of rules* atas tindakan sekuritisasinya sendiri (Bright 2012).

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh AS dalam bentuk pembunuhan terhadap Soleimani kemudian menimbulkan berbagai kritik yang dianggap bertentangan dengan tindakan sekuritisasi yang selayaknya. Kritik terhadap implementasi sekuritisasi AS memiliki kecenderungan AS telah menimbulkan aksi yang telah melanggar hukum. Adapun kritik terhadap sekuritisasi AS mengarah pada bukti bahwa AS telah melakukan pelanggaran hukum dari dua pihak, yaitu dari pihak internal dan eksternal AS.

Dari segi Pihak Internal, kritik tersebut dilontarkan oleh pihak Iran melalui pernyataan resmi dari Pemimpin Agung Iran, Ali Khamenei dengan menyerukan seluruh masyarakat Iran untuk berkabung selama tiga hari pasca-penembakan Soleimani yang dijadikan sebagai sosok berpengaruh terhadap perlawanan internasional. Ditambah juga, Khamenei menyatakan siap membalas dendam secara keras terhadap AS yang telah mengancam stabilitas keamanan negara Iran. Lalu, dilanjutkan dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani mengkritik terhadap Trump yang telah membawa AS ke dalam kondisi dan situasi yang berbahaya dan perlu diberikan konsekuensi sambil menyatakan balasan terhadap AS dengan menyatakan perang yang dijadikan sebagai pandangan rencana Perang Dunia ketiga (Associated Press 2020).

Setelah itu, dilanjutkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif dengan mengkritik terhadap tindakan AS membunuh Soleimani merupakan sebuah tindakan yang dikategorikan *act of war* terhadap Iran. Lalu, Zarif menambahkan melalui pidatonya di Televisi Iran dengan konteks bahwa Trump mengambil langkah yang bodoh dan justru membunuh Soleimani sebagai komando jenderal besar IRGC membuat Trump perlu bercermin dari pemahamannya tentang siapa teroris yang sebenarnya. Disebabkan dari intervensi AS bagi Timur Tengah tentu mendorong Zarif untuk mengakhiri konflik ini dengan menyingkirkan pergerakan kepentingan AS dari Kawasan Timur Tengah (Al Jazeera News Agencies 2020). Kritik yang dibangun oleh Iran tentu mendorong untuk mengambil langkah dengan menyerukan respon untuk perang melawan AS melalui pengibaran bendera merah di Masjid Jamkaran di Kota Suci Syiah Qom, Iran pada tanggal 6 Januari 2020. Pengibaran bendera

merah tersebut dijadikan sebagai panggilan Iran untuk membalas kematian Soleimani yang dibunuh oleh AS di Bandara Internasional Baghdad, Irak (Arnani and Ratriani 2020).

Bahkan, diperkuat dengan adanya kritik dari Kedutaan Besar Iran untuk PBB yang menyatakan bahwa AS telah melakukan aksi militer yang bertentangan dengan hukum, sehingga memungkinkan untuk diberikan serangan balasan dari Iran. Dibuktikan dari pernyataan yang disampaikan oleh Dubes Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi bahwa AS secara nyata telah melakukan aksi kriminal dan terorisme negara atas pelaksanaan sekuritisasi dalam bentuk pembunuhan Soleimani. Majid juga menganggap tindakan AS secara sah telah melanggar HAM dan Hukum Internasional, khususnya pada Piagam PBB ketika di tanggal 4 Januari 2020, Iran melaporkan tindakan AS kepada PBB. Meskipun demikian, di dalam Piagam PBB juga terdapat konteks yang bersifat dilematik yang akan dibahas dari segi eksternal sebagai pihak yang berada di luar konflik antara AS dan Soleimani dari Iran (Mayangsari 2020).

Sedangkan, dari sisi pihak eksternal, AS terbukti telah melanggar hukum atas pelaksanaan sekuritisasinya terhadap pembunuhan Soleimani. Alasannya, ketika AS memulai pemanfaatan langkah Sekuritisasi dalam membunuh Soleimani tentu merupakan upaya sekuritisasi yang memberikan dampak buruk bagi keamanan internasional. Dilema yang diperkuat yaitu penyalahgunaan pada implementasi sekuritisasi Trump melalui kebijakan dan tindakan keamanan dengan menyinggung pembelaan pada Artikel 51 *United Nations Charter* sebagai pendukung dari hak yang bersifat kolektif dari kebijakan resmi awal Trump yang menetapkan IRGC dan Soleimani ditetapkan sebagai teroris pada tahun 2019 lalu

dan menjadi upaya AS dalam menjalankan *self-defenseny*a melalui *war on terrorism*. Meski adanya relevansi pada langkah tersebut, namun pada pasca-peristiwa pembunuhan Soleimani tentu menimbulkan efek berbahaya secara bilateral hingga ke kalangan internasional. Seperti berkaca pada upaya pembunuhan oleh AS terhadap Osama bin Laden pada tahun 2011, di mana Osama menjadi pelaku pada Peristiwa 11 September 2001 silam. Pembunuhan yang dilakukan oleh AS termasuk pada *war on terrorism* dengan bukti yang bersifat nyata dan sangat berlawanan dengan peristiwa yang menimpa Soleimani pada awal tahun 2020 (Dilanian 2020).

Pembunuhan Soleimani oleh AS juga secara sah ditemukan berbagai indikasi pelanggaran hukum, seperti pelanggaran dalam Hukum Internasional dengan mencari bukti jenis pelanggaran yang dilakukan oleh AS pada pelaksanaan sekuritisasinya. Jika dibuktikan menurut Hukum Internasional, Soleimani dapat dikategorikan sebagai *Direct Participation Hostilities* (DPH) atau partisipan dalam pertempuran jika terbukti melancarkan aksi serangan terhadap AS. Padahal, Soleimani saat itu belum pernah menyatakan secara langsung untuk melawan AS, meski sebelumnya sempat bersinggungan dengan AS secara tidak langsung. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan problematika peristiwa pada pelaksanaan sekuritisasi oleh AS, di mana seluruh pelaksanaan sekuritisasi AS terhadap pembunuhan Soleimani merupakan tindakan yang diibaratkan keinginan untuk mencari musuh oleh AS yang dilandasi dengan salah satu pasal Piagam PBB tersebut oleh AS itu sendiri. Artinya, sekuritisasi terhadap Soleimani hanya menjadi klaim dari AS, namun ditentang oleh pihak internasional. Salah satunya, pelaksanaan sekuritisasi AS tersebut terjadi di salah satu negara yang bukan

menjadi subjek dan objek yang terlibat. Penggunaan kekerasan dalam bentuk sekuritisasi AS dianggap telah melanggar wilayah teritorial Irak karena peristiwa pembunuhan Soleimani oleh AS terjadi di Baghdad, Irak. Bahkan, pembunuhan Soleimani yang dilakukan oleh AS itu bersifat ilegal dan tidak diizinkan oleh pemilik kedaulatan wilayah teritorial negara kejadian yaitu Irak. Diperkuat melalui PBB, pembunuhan Soleimani oleh AS telah melanggar dari Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) yang mengkategorikan bahwa sekuritisasi AS dalam membunuh Soleimani termasuk pada penyerangan di darat, laut, dan udara melalui persenjataan di negara lain (Anugrah and Puspoayu 2021).

Dari berbagai kritik tersebut, berkaitan dengan sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor bahwa hal ini akan menjadi dilematik bagi *referent object* maupun aktor fungsional dalam segi penuduhan AS menjadikan Iran dan Soleimani sebagai ancaman eksistensial yang telah merugikan kepentingan intervensi AS di Timur Tengah. Dilematik yang terjadi tentu menimbulkan kalangan internasional mengalami kesulitan dalam menghadapi konflik antara AS dan Iran dengan skenario yang diimplementasikan AS merupakan skenario yang sangat buruk. Pengambilan langkah sekuritisasi AS dengan membunuh Soleimani tentu berimbas dengan Iran dengan persepsi bahwa AS juga sebagai ancaman dan merasa layak untuk dibalas dengan serangan meski pertimbangan yang dialami begitu kecil bagi Iran. Efek dari dilematik pada sekuritisasi AS dengan melakukan pembunuhan Soleimani tentu berimbas menjadi *breaking free of rules* yang dilakukan oleh AS itu sendiri hingga menimbulkan kritik yang menganggap AS telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan bukti yang telah dipaparkan dari berbagai segi tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran kembali mengalami eskalasi sejak pertengahan tahun 2018. Terjadinya eskalasi konflik antar kedua negara tersebut disebabkan ketika memasuki masa pertengahan Pemerintah AS era Trump, di mana Trump memiliki sudut pandang kebijakan yang jauh berbeda dari masa kepresidenan AS sebelumnya yaitu menyatakan AS keluar dari Perjanjian Nuklir 2015 atau dikenal dengan sebutan JCPOA pada tahun 2018. Keluarnya AS dari JCPOA merupakan awal upaya AS untuk menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran yang dianggap telah menyalahgunakan sumber tenaga nuklir yang telah disepakati melalui perjanjian tersebut. Peristiwa tersebut juga berpengaruh terhadap Qasem Soleimani melalui IRGC Iran yang kerap melakukan operasi militer di beberapa negara Timur Tengah, bahkan berdampak bagi AS. Memanasnya kedua negara tersebut kemudian mendorong dengan adanya upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh AS terhadap Iran yang telah dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan intervensinya.

Menurut Teori Sekuritisasi oleh Buzan dan Weaver, tindakan sekuritisasi merupakan upaya keamanan yang dilakukan oleh aktor dominan dengan membawakan kepentingan nasionalnya ke negara lain dalam rangka menghadapi suatu ancaman yang telah dipolitisir. Ancaman tersebut bersifat eksistensial yang seolah-olah telah di-*framing* oleh aktor sekuritisasi melalui *speech act* yang dibawakannya. *Speech act* dari suatu aktor tentu menjadi dasar aktor sekuritisasi

untuk mengimplementasikan peranannya, baik dari pernyataan, kebijakan, maupun tindakan berlanjut atas legitimasi terhadap *referent object*. Aktor sekuritisasi juga tidak hanya merujuk dari *referent object*-nya saja, tetapi juga dipengaruhi dengan adanya keterlibatan dari aktor fungsional sebagai dasar sekuritisasi yang begitu signifikan. Dasar tersebut menjadi langkah dari aktor untuk melaksanakan sekuritisasinya dengan tindakan perlawanan terhadap aktor fungsional hingga menimbulkan dari *breaking free of rules* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi itu sendiri.

Dari sudut pandang teori mengindikasikan bahwa *speech act* yang dibawakan Trump sebagai entitas kepemimpinan AS dapat memberikan pengaruh bagi negerinya sendiri maupun negara lain dengan menjadikan Iran sebagai ancaman baginya. Bahkan, ancaman bagi AS semakin mengerucut dengan mendapatkan berbagai informasi yang menyatakan segala tindakan yang berdampak merugikan kepentingan AS berasal dari langkah yang dilakukan oleh Soleimani sebagai aktor yang merepresentasikan keamanan dari Iran dengan organisasi militer resmi negaranya yaitu IRGC. Berbagai tindakan Soleimani tentu sangat berpengaruh bagi AS dan Iran dengan adanya operasi militer dan pembentukan kerja sama militer Iran dan negara tetangga yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *proxy war*. Untuk mencegah dari adanya persaingan kekuatan dan campur tangan kepentingannya, Trump mengambil kebijakan resmi AS dengan menyatakan IRGC dan Soleimani termasuk dalam FTO atau pelaku kejahatan terorisme.

Alasannya, AS menganggap segala tindakan yang dilakukannya merasa dihalangi dengan upaya pembasmian yang dilakukan oleh Soleimani terhadap

negeri sahabatnya, seperti Arab Saudi, Israel, dan Irak. Langkah kebijakan AS tersebut kemudian didukung dengan elite politiknya yang kemudian ikut serta dalam melaksanakan perlawanan tersebut. Perlawanan antara AS dan Iran tersebut semakin bersitegang selama tahun 2019 dengan adanya aksi saling menyerang hingga memasuki bulan Desember 2019. Aksi saling menyerang tersebut hingga mencapai puncak konflik ketika adanya masyarakat sipil dan militer AS yang menjadi korban dan penyerangan mobilisasi masyarakat afiliasi Iran terhadap objek diplomasi AS yang berada di Irak. Puncak konflik tersebut mendorong Trump secara langsung memerintahkan militernya untuk membunuh Soleimani dengan serangan *drone* di awal tahun 2020. Perintah tersebut kemudian diimplementasikan saat Soleimani tewas di Bandara Internasional Baghdad, Irak pada tanggal 3 Januari 2020.

Hingga pada akhirnya, AS telah mencapai langkah sekuritisasi yang dilakukannya dengan membunuh Soleimani sebagai bagian dalam *war on terrorism* dan *self-defense* AS itu sendiri. Melalui *speech act* yang disuarakan oleh Trump tentu sangat berpengaruh bagi hubungan internasional atas arahannya terhadap Soleimani. Dengan demikian, implementasi sekuritisasi yang dilakukan AS terhadap Iran dalam membunuh Soleimani memiliki kesesuaian dengan konsep Sekuritisasi pada perspektif Buzan dan Weaver termasuk juga langkah pelanggaran hukum atau *breaking free of rules* juga berkesinambungan dengan sekuritisasi yang dilakukan AS, meskipun langkah tersebut menimbulkan kritik dari ahli keamanan dan akademisi yang menganggap bertentangan dengan konsep sekuritisasi yang seharusnya.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Penelitian ini dapat dikatakan sangat kompleks dari permasalahan yang terjadi antara AS dan Iran, meskipun telah dispesifikan dengan mencakup IRGC dan Soleimani sebagai objek penelitian. Bahkan, penelitian ini juga masih terbatas pada akses data primer yang cenderung didominasi dari sudut pandang AS dibandingkan dengan Iran dalam kasus pembunuhan Soleimani. Akan tetapi, peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk menganalisis secara rinci mengenai bagaimana implementasi sekuritisasi AS dalam segi pemikiran Trump atas idenya dalam melakukan pembunuhan Soleimani. Lalu, akan lebih menarik jika menganalisis pengaruh idiosinkratik dari Soleimani itu sendiri terhadap Iran yang dianggap sebagai sosok berpengaruh kedua setelah Pemimpin Agung Iran, Ali Khamenei hingga mengakibatkan AS mengambil langkah untuk memberikan sasaran utamanya kepada Soleimani dibandingkan dari Khamenei.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Irman, Alfian Hamzah, and Musa Kazim. 2020. *Jenderal Qasem Soleimani: Jalan Cinta Sang Penumpang ISIS*. Tangerang Selatan: Penerbit Imania.
- Agustina, Ilma A., and Tom Finaldin. 2020. "Penyebab Tewasnya Qaseem Soleimani oleh Amerika Serikat dan Dampaknya Terhadap Keamanan Internasional." *Global Mind Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Unfari* 2 (1): 1-12. <https://doi.org/10.53675/jgm.v2i1.60>.
- Alaaldin, Ranj. 2020. "Around the halls: Experts react to the killing of Iranian commander Qassem Soleimani." Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/03/around-the-halls-experts-react-to-the-killing-of-iranian-commander-qassem-soleimani/>.
- Al Jazeera News Agencies. 2019. "US-Iran standoff: A timeline of key events." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/25/us-iran-standoff-a-timeline-of-key-events>.
- Al Jazeera News Agencies. 2020. "World reacts to US killing of Iran's Qassem Soleimani in Iraq." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/1/3/world-reacts-to-us-killing-of-iran-qassem-soleimani-in-iraq>.
- Al Jazeera News Agencies. 2020. "Soleimani killing: Iran's Zarif vows response to US 'act of war.'" Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/1/7/soleimani-killing-irans-zarif-vo- ws-response-to-us-act-of-war>.
- al-Sudani, Thair. 2015. "Insight - From eastern flank, Iran-backed force advances on Tikrit." Reuters. <https://www.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-iraq-front-idUKKBN0M01NR20150304>.
- Andriani, Renat S. 2019. "Iran Berupaya Rebut Kapal Tanker Minyak Inggris." *kabar24.bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190711/19/1122941/iran-berupaya-rebut-kapal-tanker-minyak-inggris>.
- Anugrah, Evelyn Zunita B., and Elisabeth S. Puspoayu. 2021. "ANALISIS YURIDIS PEMBUNUHAN JENDERAL SOLEIMANI DIKAITKAN DENGAN KONSEP TARGETED KILLING DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." *Novum: Jurnal Hukum Unesa* 9, no. 1 (Mei): 7-15. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.39053>.
- Arnani, Mela, and Virdita R. Ratriani. 2020. "Iran Kibarkan Bendera Merah, Apa Artinya? Halaman all." Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/06/134350665/iran-kibarkan-bendera-merah-apa-artinya?page=all>.
- Associated Press. 2020. "US Kills Iran's most powerful general in Baghdad airstrike." Whio.com. <https://www.whio.com/news/world/iraq-least-katyusha-rockets-fired-baghdad-airport/Q6YOHuM4TeDt92KglzQ8iL/>.
- Associated Press (AP). 2019. "Protests in Iraq and Lebanon Pose a Challenge to

- Iran.” VOA News.
https://www.voanews.com/a/middle-east_protests-iraq-and-lebanon-pose-c-hallenge-iran/6178522.html.
- Barnes, Julian E. 2019. “U.S. Launches Airstrikes on Iranian-Backed Forces in Iraq and Syria (Published 2019).” *The New York Times*.
<https://www.nytimes.com/2019/12/29/world/middleeast/us-airstrikes-iran-iraq-syria.html>.
- BBC Indonesia. 2020. “Sejarah 70 tahun konflik Iran-AS: Dari minyak, nuklir hingga pembunuhan Qasem Soleimani.” BBC.com.
<https://www.bbc.com/indonesia/media-51006674>.
- BBC News. 2019. “Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists.” BBC.com.
<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140>.
- BBC News. 2020. “Qasem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike.” BBC.com.
<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463>.
- Bright, Jonathan. 2012. “Securitisation, terror, and control: towards a theory of the breaking point.” *Review of International Studies* 38, no. 4 (October): 865-867. Doi: 10.1017/S0260210511000726.
- Burns, Robert, and Ellen Knickmeyer. 2020. “Attack on US Embassy in Iraq shows Iran can still strike at American interests.” *The Times of Israel*.
<https://www.timesofisrael.com/attack-on-us-embassy-in-iraq-shows-iran-can-still-strike-at-american-interests/>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap d. Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado, US: Lynne Rienner Pub.
- Christiyaningsih. 2020. “AS Tambah Tuduhan ke Iran.” *Republika*.
<https://www.republika.co.id/berita/q3xqr1459/as-tambah-tuduhan-ke-iran>.
- Chung, Andrew. 2020. “U.S. 'self-defense' argument for killing Soleimani meets skepticism.” *Reuters*.
<https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-blast-legal-analysis-idUSKBN1Z301R>.
- CNN Indonesia. 2020. “Partai Demokrat AS Kritik Trump Soal Pembunuhan Jenderal Iran.” *CNNIndonesia.com*.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103141410-134-462177/partai-demokrat-as-kritik-trump-soal-pembunuhan-jenderal-iran>.
- Contorno, Steve. 2020. “Florida Republicans and Democrats react to targeted killing of top Iranian general.” *Tampa Bay Times*.
<https://www.tampabay.com/florida-politics/buzz/2020/01/03/florida-republicans-and-democrats-react-to-targeted-killing-of-top-iranian-general/>.
- Cunningham, Erin, and Karla Adam. 2019. “Iran attack on British tanker thwarted by navy ship.” *The Washington Post*.
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/britain-says-it-thwarted-iranian-vessels-interfering-with-tanker-in-the-strait-of-hormuz/2019/07/11/a6559f0a-a39e-11e9-bd56-eac6bb02d01d_story.html.
- Dilanian, Ken. 2020. “Was it legal for Donald Trump to order the killing of a top Iranian general?” *NBC News*.
<https://www.nbcnews.com/news/world/was-it-legal-donald-trump-order-killing-top-iranian-general-n1109961>.

- Floyd, Rita. 2016. "Extraordinary or Ordinary Emergency Measures: what, and who, decides the "success" of securitization?" *Cambridge Review of International Affairs* 29 (2): 679.
<https://doi.org/10.1080/09557571.2015.1077651>.
- Garger, Kenneth. 2020. "Trump calls Qassem Soleimani a 'son of a bitch' at rally." *New York Post*.
<https://nypost.com/2020/01/14/trump-calls-dead-iranian-gen-qassem-soleimani-a-son-of-a-bitch-at-rally/>.
- Guy, Jack. 2019. "Iran warns of 'consequences' after US strikes in Iraq and Syria." *CNN*.
<https://edition.cnn.com/2019/12/30/middleeast/iraq-us-airstrikes-reaction-intl/index.html>.
- Harding, Luke. 2019. "Trump accuses Iran over storming of US embassy compound in Baghdad." *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/world/2019/dec/31/us-embassy-stormed-in-baghdad>.
- Hassan, Falih, and Alissa Rubin. 2019. "Rocket Hits Green Zone in Baghdad as Tensions Flare Between U.S. and Iran (Published 2019)." *The New York Times*.
<https://www.nytimes.com/2019/05/19/world/middleeast/rocket-baghdad-greenzone.html>.
- Helmore, Edward. 2020. "Democratic presidential candidates condemn killing of Iran general." *The Guardian*.
<https://www.theguardian.com/world/2020/jan/03/iran-general-killing-democrats-reaction>.
- Iswara, Aditya J. 2021. "Profil Qasem Soleimani, Jenderal yang Kematiannya Melemahkan Iran Halaman all." *Kompas.com*.
<https://www.kompas.com/global/read/2021/01/03/110204870/profil-qasem-soleimani-jenderal-yang-kematiannya-melemahkan-iran?page=all>.
- Jose, Hino S., and Laode M. Fathun. 2021. "US - Iran Proxy War in Middle East Under Trump Administration." *Journal of Political Issues* 3, no. 1 (July): 39-40. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.45>.
- Kirkpatrick, David D. 2019. "Iran Tried to Block British Tanker in Persian Gulf, U.K. Says (Published 2019)." *The New York Times*.
<https://www.nytimes.com/2019/07/11/world/middleeast/iran-british-tanker.html>.
- Lenz-Raymann, Kathrin. 2014. *Securitization of Islam: A Vicious Circle*. Biefeld: Transcript Verlag.
- Mayangsari, Asri. 2020. "Dubes Iran pembunuhan Soleimani sama saja dengan perang - ANTARA News Kalimantan Barat." *Antara Kalbar*.
<https://kalbar.antarane.ws.com/berita/399835/dubes-iran-pembunuhan-soleimani-sama-saja-dengan-perang>.
- McLaughlin, Elizabeth, and Luis Martinez. 2019. "US civilian contractor killed, several troops injured in rocket attack on Iraqi military base." *ABC News*.
<https://abcnews.go.com/Politics/us-civilian-contractor-killed-troops-injured-rocket-attack/story?id=67949811>.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nadira, Tita, Nuswantoro Dwiwarno, and Joko Setiyono. 2021. "Analisis Yuridis Serangan Amerika Serikat Dengan Pesawat Tanpa Awak Bersenjata Terhadap Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran di Baghdad, Irak Menurut Hukum Internasional." *Diponegoro Law Journal* 10 (2): 521.
- Nakhoul, Samia. 2020. "U.S. killing of Iran's second most powerful man risks regional conflagration." Reuters.
<https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-blast-soleimani-analysi-idUSKBN1Z21TJ>.
- Nugroho, Joko. 2019. "Sejumlah roket menghantam pangkalan militer AS di dekat Kota Kirkuk Irak." ANTARA Sumatera Barat.
<https://sumbar.antaranews.com/berita/315848/sejumlah-roket-menghantam-pangkalan-militer-as-di-dekat-kota-kirkuk-irak>.
- O'Connor, Tom, David Faris, Penny Nance, Jason Nichols, Jeff Charles, and Mark R. Weaver. 2017. "How ISIS Got Weapons From the U.S. and Used Them to Take Iraq and Syria." Newsweek.
<https://www.newsweek.com/how-isis-got-weapons-us-used-them-take-iraq-syria-748468>.
- Paramasatya, Satwika, and Sigit Wiranto. 2019. "Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran Dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)." *Jurnal Hubungan Internasional* 12, no. 2 (December): 298.
<https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14047>.
- Pompeo, Michael R. 2019. "Secretary Pompeo Announces Intent To Designate IRGC as a Foreign Terrorist Organization." U.S. Embassy in Egypt.
<https://eg.usembassy.gov/secretary-pompeo-announces-intent-to-designate-irgc-as-a-foreign-terrorist-organization/>.
- Rees, Jasper, Anita Singh, Ben Lawrence, Tom Fordy, and Benji Wilson. 2019. "Shadow Commander: Iran's Military Mastermind review: an intriguing profile of the elusive Qasem Soleimani with added comic-book stereotyping." The Telegraph.
<https://www.telegraph.co.uk/tv/2019/03/14/shadow-commander-irans-military-mastermind-review-intriguing/>.
- Reuters Staff. 2019. "Exclusive: Iran intervenes to prevent ousting of Iraqi prime minister - sources." Reuters.
<https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests-iran-exclusive-idUSKBN1XA2DI>.
- Reuters Staff. 2019. "U.S. civilian contractor killed in Iraq base rocket attack: officials." Reuters.
<https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-idUSKBN1YV1IX>.
- Rubin, Uzi. 2020. *Operation "Shahid Soleimani" Iran's Revenge*. Israel: The Begin-Sadat Center for Strategic Studies.
- Sargent, Alison. 2019. "Yemen Houthi drones hit major Saudi oil sites, sources say supplies disrupted." France 24.
<https://www.france24.com/en/20190914-drone-attacks-cause-fires-two-saudi-aramco-oil-facilities>.
- The Senate and House of Representatives of the United States of America. 2011. "Section 219 Title 8 USC 1189 Designation of Foreign Terrorist Organizations." In *Immigration and Nationality Act of 1952*, 249.

- Washington D.C., United States: U.S. House of Representatives.
 Shear, Michael D., Eric Schmitt, Michael Crowley, and Maggie Haberman. 2019. "Strikes on Iran Approved by Trump, Then Abruptly Pulled Back (Published 2019)." *The New York Times*.
<https://www.nytimes.com/2019/06/20/world/middleeast/iran-us-drone.html>
- Taufiq, Firmanda, and Ayu M. Alkholid. 2021. "Iran-US Relations After the Death of Qassem Soleimani." *Jurnal CMES (Center of Middle Eastern Studies)* 14 (2): 118. <https://doi.org/10.20961/cm.es.14.2.50830>.
- Tehran Times Straight Truth. 2019. "General Soleimani receives Iran's highest Medal of Honor." *Tehran Times*.
<https://www.tehrantimes.com/news/433947/General-Soleimani-receives-Iran-s-highest-Medal-of-Honor>.
- Torbati, Yeganeh. 2016. "Trump election puts Iran nuclear deal on shaky ground." *Reuters*.
<https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-iran-idUSKBN13427E>.
- Trihartono, Agus, Suyani Indriastuti, and Chairun Nisya. 2019. *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok: Melvana Publishing.
- Trump, Donald. 2018. "Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action – The White House." *Trump White House Archive*.
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/>.
- Trump, Donald J. 2019. "Statement from the President on the Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist Organization – The White House." *Trump White House Archive*.
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/>.
- U.S. Department of Defense. 2020. "Statement by the Department of Defense > U.S." *Department of Defense*.
<https://www.defense.gov/News/Releases/release/article/2049534/statement-by-the-department-of-defense/>.
- Wambrauw, Meyland S., and Mathius Apintamon. 2021. "Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 1, no. 1 (May): 63-67. 10.31957/pjdir.v1i1.1674.
- Winter, Chase. 2019. "Americans see war with Iran brewing - DW - 05/21/2019." *DW*.
<https://www.dw.com/en/americans-believe-war-with-iran-is-coming/a-48822649>.
- Zanotti, Jim, and Clayton Thomas. 2020. "U.S. Killing of Qasem Soleimani: Frequently Asked Questions." *Congressional Research Service Reports*.
<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46148>.